



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI RIAU



PENGADILAN TINGGI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523

 [PENGADILAN TINGGI RIAU](#)  [PT-RIAU.CO.ID](#)  +62853-5800-0101

Sekapur Sirih



Dengan berakhirnya tahun 2022 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Tinggi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan ditahun 2022. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), Pengadilan Tinggi Riau menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Secara keseluruhan, Laporan Kegiatan Tahun 2022 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Riau yang selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan diharapkan berujung pada peningkatan pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pengadilan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap Hakim dan karyawan karyawan Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Riau ditahun berikutnya.

Pekanbaru, 03 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



H. MOHAMMAD IDROES, S.H.,M.HUM.



TENTANG PENGADILAN TINGGI RIAU

Pengadilan Tinggi/Tipokor Riau berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru - Riau. No. Telp/Fax : (0761) 21523.

Pada awalnya Pengadilan Tinggi Riau merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982, Pengadilan Tinggi Riau didirikan di atas lahan seluas 5.000 M2 dengan luas bangunan 1.706 M2 dan diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau meliputi propinsi Riau dan propinsi Kepulauan Riau, yang saat ini terdiri dari 15 (lima belas) Pengadilan Negeri yaitu :

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA | 09 | Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Kelas II |
| 02 | Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA | 10 | Pengadilan Negeri Rengat Kelas II |
| 03 | Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB | 11 | Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II |
| 04 | Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB | 12 | Pengadilan Negeri Batam Kelas IA |
| 05 | Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB | 13 | Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA |
| 06 | Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB | 14 | Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II |
| 07 | Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II | 15 | Pengadilan Negeri Ranai Kelas II |
| 08 | Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II | | |

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan telah dilaksanakan Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 5 Desember 2021 maka terdapat 4 (empat) Pengadilan Tingkat Pertama yang tadinya merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Adapun 4 Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II, Pengadilan Negeri Ranai Kelas II. Maka saat ini Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau terdiri dari 11 (sebelas) Pengadilan Negeri.



VISI

"Mewujudkan Pengadilan Tinggi Riau Yang Agung"

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Riau.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Riau.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Riau.

NILAI NILAI UTAMA

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidak berpihakan dan
8. Perlakuan yang sama di depan hukum

PROFIL PIMPINAN



KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.
NIP : 19570303 198303 1 007
TTL : Bangkalan, 03 Maret 1957
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S2 Univ. Narotama Surabaya

RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	2022 - Sekarang	Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Riau
2	2020 - 2022	Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin
3	2019 - 2020	Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung
4	Jan 2019 - Sept 2019	Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Bengkulu
5	2017 - 2019	Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
6	2016 - 2017	Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
7	2013 - 2016	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya
8	2011 - 2013	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
9	2009 - 2011	Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
10	2007 - 2009	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
11	2006 - 2007	Ketua Pengadilan Negeri Klaten
12	2005 - 2006	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten
13	2002 - 2005	Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
14	2000 - 2002	Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk
15	1995 - 2000	Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto
16	1990 - 1995	Hakim Pengadilan Negeri Tabanan
17	1985 - 1990	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung
18	1984 - 1985	PNS/Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
19	1983 - 1984	CPNS/Cakim Pengadilan Negeri Surabaya

PROFIL PIMPINAN



WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP : 19610402 198203 2 003
TTL : Medan, 02 April 1961
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Pendidikan : S3 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	2022 s.d Sekarang	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
2	Maret 2022 – Aug 2022	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
3	2021 - 2022	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
4	2017 - 2021	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
5	2016 - 2017	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung
6	2015 - 2016	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
7	2014 - 2015	Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
8	2013 - 2014	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
9	2011 - 2013	Ketua Pengadilan Negeri Stabat
10	2010 - 2011	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat
11	2009 - 2010	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
12	2004 - 2009	Hakim Pengadilan Negeri Bandung
13	2000 - 2004	Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung
14	1996 - 2000	Hakim Pengadilan Negeri Sumber
15	1993 - 1996	Cakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
16	1983 - 1993	PNS/Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan
17	1982 - 1983	CPNS Pengadilan Tinggi Medan

HAKIM TINGGI



SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum.



NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.



BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.



KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.



IMAN GULTOM, S.H., M.H.



DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum

HAKIM TINGGI



ASWIJON, S.H., M.H.



ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.



H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.



ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.



NOER ALI, S.H.



LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

HAKIM TINGGI



JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H.



SETIA RINA, S.H., M.H.



Hj. DAHMIWIRDA D., S.H., M.H.



YUS ENIDAR, S.H., M.H.



YUZAIDA, S.H., M.H.



JON EFFREDDI, S.H., M.H.

HAKIM TINGGI



ADMIRAL, S.H., M.H.



Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.



SRI ENDANG AMPERAWATI NINGSIH, S.H., M.H.



LILIN HERLINA, S.H., M.H.



Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.



TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.

HAKIM TINGGI AD HOC



TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.



Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.



HENDRI, S.H., M.H.



PROFIL PIMPINAN



PANITERA PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : TJATUR WAHJOE B.S.P., S.H., M.Hum
NIP : 19630517 199103 1 003
TTL : Tuban, 17 Mei 1963
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Riau
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum Univ. Narotama
Surabaya

RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	1991	CPNS Pengadilan Negeri Sidoarjo
2	1992	PNS Pengadilan Negeri Sidoarjo
3	1997 - 1999	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo
4	1999	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo
5	1999 - 2000	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan
6	2000 - 2002	Panitera / Sekretaris Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk
7	2002 - 2004	Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kediri
8	2004 - 2005	Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Palu
9	2005 - 2007	Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo
10	2007 - 2009	Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar
11	2009 - 2014	Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan
12	2014 - 2015	Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta
13	2015 - 2019	Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta
14	2019 - Sekarang	Panitera Pengadilan Tinggi Riau

PROFIL PIMPINAN



SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI RIAU

Nama : T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP.,
S.H., M.M.
NIP : 19790221 200502 1 001
TTL : Solok Selatan, 21 Februari 1979
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Pendidikan : S2 Magister Management
Universitas Andalas Padang

RIWAYAT JABATAN

No	Tahun	Jabatan
1	2005-2006	Staf Pengadilan Negeri Lubuk Basung
2	2006-2008	Staf Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Basung
3	2008-2010	Staf Urusan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung
4	2010-2015	Kepala Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Padang
5	Desember 2015 - Agustus 2021	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Padang
6	Agustus 2021 - Sekarang	Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau



- PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN TINGGI RIAU -



- KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI RIAU -

PERISTIWA PENTING 2022 PENGADILAN TINGGI RIAU



PENGADILAN TINGGI RIAU MENJADI TUAN RUMAH PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL

Acara Pembinaan ini dilakukan secara Luring dan Daring selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2022 di Hotel Best Western Premier Panbil - Batam. Pembinaan dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. beserta Pimpinan Mahkamah Agung Lainnya.



PENYERAHAN TANAH DAN SERTIFIKAT TANAH CALON LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan penyerahan sertifikat tanah hibah untuk pembangunan kantor Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terletak di Dompok, Tanjungpinang dari Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H pada tanggal 28 Januari 2022



FGD DENGAN TEMA "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

Pengadilan Tinggi Riau mengadakan kegiatan FGD pada tanggal 8 Maret 2022. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Kabid Hukum Polda Riau, Bapak Dr. Endang Usman, S.H., M.A serta Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Tinggi Riau, Bapak Adi Hardiyanto Wicaksono, S.H., M.H. secara langsung di kantor Pengadilan Tinggi Riau.



BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN

Pengadilan Tinggi Riau mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022 di Hotel Grand Jatra Pekanbaru yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 23-25 Maret 2022.

PERISTIWA PENTING 2022

PENGADILAN TINGGI RIAU



KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022

Ketua Pengadilan Tinggi Riau mengikuti Rapat dengan Komisi III DPR RI dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau bersama 3 Lingkungan Peradilan Wilayah Riau dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Riau Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 bertempat di Mulia Room 3-4 Lantai 2 Hotel Premiere Pekanbaru



BIMBINGAN TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BIDANG KESEKRETARIATAN SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU

Pengadilan Tinggi Riau mengadakan Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Kesekretariatan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau selama 3 (tiga) hari pada tanggal 30 November s.d 2 Desember 2022 di Hotel Pangeran Pekanbaru.



PEREMSIAN OPERASIONAL 13 PENGADILAN TINGKAT BANDING BARU DAN 38 GEDUNG PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H meresmikan 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama di Tanjung Pinang pada tanggal 5 Desember 2023. Salah satu Pengadilan Tingkat Banding yang baru diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.



PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ANTARA PENGADILAN TINGGI RIAU DAN APH TERKAIT SERTA ASISTENSI IMPLEMENTASI E-BERPADU MA RI

Bertempat di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 Desember 2022 dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Tinggi Riau dengan Aparat Penegak Hukum Terkait yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kepolisian Daerah Riau, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau serta dilaksanakan juga Asistensi Aplikasi E-Berpadu Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2022



PRESTASI TERBAIK MEMBINA SATKER DI BAWAHNYA DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN DIPA 03 TA 2021

Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan dari Dirjen Badilum atas Prestasi terbaik membina Satker dibawahnya dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA 03 TA 2021 (Kategori Jumlah Satker dibawahnya s.d 11 -20) dengan realisasi diatas 95%. Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau Bapak T. Yudianto Syafei Narim, S.IP., S.H., M.M. pada tanggal 07 Juli 2022 di Pullman Hotel Jakarta Central Park



PERINGKAT I IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Pengadilan Tinggi Riau menerima Penghargaan dari Dirjen Badilum atas Peringkat I Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 80,30 (A). Penghargaan ini diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Bapak H. Mohammad Idroes, S.H., M.Hum. pada tanggal 12 Desember 2022 di di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta



HARAPAN I ATAS PEMENANG LOMBA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TAHUN 2022

Pengadilan Tinggi Riau menerima Penghargaan dari Dirjen Badilum Harapan I atas Pemenang Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2022 dengan kategori terbaik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2474/DJU/SK/HM 02.3/12/2022 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022 diberikan di Di Hotel Tentrem Jogjakarta tanggal 11 Desember 2022



HARAPAN II ATAS PELAKSANAAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) TERBAIK PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI TAHUN 2022

Pengadilan Tinggi Riau menerima Penghargaan dari Dirjen Badilum Harapan II atas Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Terbaik Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tahun 2022 bedasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2474/DJU/SK/HM 02.3/12/2022 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022 diberikan di Di Hotel Tentrem Jogjakarta tanggal 11 Desember 2022

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM RIAU TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA

Peringkat III Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2022 Kategori Terbaik



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Peringkat III Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2022 Kategori Terbaik



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA

Peringkat II Lomba Pelaksanaan Layanan Hukum Prodeo Tahun 2022

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM RIAU TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Peringkat I Lomba Pelaksanaan
Layanan Hukum Posbakum Tahun
2022



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS II

Harapan II Lomba Pelaksanaan Layanan
Hukum Sidang Diluar Gedung
Pengadilan Tahun 2022



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA

Harapan I Lomba Pelaksanaan Evaluasi
Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2022
Kategori di Atas 2000 Perkara

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM RIAU TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Harapan III Lomba Pelaksanaan
Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)
Tahun 2022
Kategori 1 s.d 1000 Perkara



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Harapan I Lomba Pelaksanaan
Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)
Tahun 2022
Kategori 501 s.d 1000 Perkara



PENGADILAN NEGERI RENGAT / INDRAGIRI KELAS II

Peringkat II Lomba Pelaksanaan
Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)
Tahun 2022
Kategori 501 s.d 1000 Perkara

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM RIAU TAHUN 2022



**PENGADILAN NEGERI PASIR
PENGARAIAN KELAS II**
**Harapan III Lomba Pelaksanaan
Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)
Tahun 2022**
Kategori 501 s.d 1000 Perkara



**PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
KELAS IA**
**Peringkat II Akreditasi Penjaminan
Mutu Terbaik pada Pengadilan Negeri
Kelas IA Tahun 2022**

DAFTAR ISI

PROFIL PIMPINAN	5
HAKIM TINGGI	6
PROFIL PIMPINAN	12
DAFTAR ISI	23
DAFTAR TABEL.....	25
DAFTAR GAMBAR	26
BAB I PENDAHULUAN.....	27
A. KEBIJAKAN UMUM.....	28
B. STRUKTUR ORGANISASI	29
BAB II KEADAAN & PENYELESAIAN PERKARA.....	30
A. KEADAAN PERKARA	31
1. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA.....	31
2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING	35
3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI	35
4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI	36
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	37
1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS	37
2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	39
3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PK 41	
4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI	42
5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI	43
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO DIPENGADILAN)	44
1. POSBAKUM.....	44
2. SIDANG KELILING/LAYANAN TERPADU.....	44
3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)	45
BAB III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.....	46
A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA	47
1. SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TINGGI RIAU	47
2. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU.....	50
3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN	51
4. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN	51
5. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA	52
B. PROMOSI & MUTASI	53
C. PENSIUN.....	55
D. DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)	56
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI ..58	
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	59

1. REALISASI DIPA 01	59
2. REALISASI DIPA 03	61
3. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	62
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	62
1. TANAH	62
2. TANAH & GEDUNG	63
3. KENDARAAN DINAS	65
4. MESIN NON TIK.....	66
5. MESIN TIK	67
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	67
1. IMPLEMENTASI E-COURT	67
2. IMPLEMENTASI SIPP.....	68
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	69
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	70
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	71
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	72
BAB VI PENGAWASAN.....	74
A. INTERNAL.....	75
1. PENGAWASAN DAERAH.....	75
2. PENGAWASAN BIDANG	78
3. PENANGANAN PENGADUAN	79
4. EVALUASI.....	84
BAB VII PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Pidana Biasa dan Pidana Khusus Pengadilan Tingkat Pertama.....	31
Tabel 2. Perkara Perdata dan Perdata Khusus Pengadilan Tingkat Pertama.....	33
Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	35
Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	35
Tabel 5.Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	36
Tabel 6. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2022	37
Tabel 7. Jumlah sisa perkara Pidana Tingkat Pertama yang diputus tahun 2022	37
Tabel 8. Jumlah sisa perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama yang diputus tahun 2022	38
Tabel 9. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang diputus tepat waktu.....	39
Tabel 10. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu	39
Tabel 11. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	41
Tabel 12. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di Mediasi	42
Tabel 13. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	43
Tabel 14. Posbakum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	44
Tabel 15. Sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	45
Tabel 16. Perkara prodeo di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	45
Tabel 17. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Riau	47
Tabel 18. SDM Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau	50
Tabel 19. SDM berdasarkan kelompok Golongan	51
Tabel 20. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan PT Riau	51
Tabel 21. Penghargaan Satya Lencana.....	52
Tabel 22. Mutasi masuk PT Riau	53
Tabel 23. Mutasi Keluar dari PT Riau.....	53
Tabel 24. Promosi & Mutasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau	54
Tabel 25. Pensiun di Pengadilan Tinggi Riau	55
Tabel 26. Pensiun Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau	56
Tabel 27. Jumlah mengikuti diklat teknis dan non teknis.....	56
Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 01	59
Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03	61
Tabel 30. Realisasi PNBPN Tahun 2022.....	62
Tabel 31. Daftar Tanah	63
Tabel 32. Daftar PSP Tanah & Gedung	63
Tabel 33. Daftar PSP Kendaraan dinas.....	65
Tabel 34. Daftar PSP Mesin Non TIK	66
Tabel 35. Daftar PSP Mesin TIK	67
Tabel 36. Implementasi E-Court Tahun 2022.....	67
Tabel 37. Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	70
Tabel 38. Hasil Penilaian Lomba PTSP Dirjen Badilum.....	71
Tabel 39. Inovasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau	72
Tabel 40. Pengawasan daerah Tahun 2022.....	76
Tabel 41. Penanganan Pengaduan.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau	29
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum PT Riau	29
Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau	29
Gambar 4. Evaluasi Implementasi SIPP	68



PENGADILAN TINGGI RIAU

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Pengadilan Tinggi Riau merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI yang membawahi 15 (lima belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Riau dan kepulauan Riau, yang meliputi :

1. PN Pekanbaru Kelas IA
2. PN Tanjung Pinang Kelas IA
3. PN Batam Kelas IA
4. PN Dumai Kelas IA
5. PN Bangkinang Kelas IB
6. PN Pelalawan Kelas II
7. PN Siak Sri Indrapura Kelas II
8. PN Rengat Kelas II
9. PN Bengkalis Kelas II
10. PN Pasir Pengaraian Kelas II
11. PN Tembilahan Kelas II
12. PN Rokan Hilir Kelas II
13. PN Tanjung Balai Karimun Kelas II
14. PN Ranai Kelas II
15. PN Teluk Kuantan Kelas II

Pada tahun 2022, di masa pandemi covid19 Pengadilan Tinggi Riau dan seluruh satker dibawahnya tetap berupaya melaksanakan tupoksinya dengan baik dan mengikuti regulasi Mahkamah Agung terkait penanganan Covid-19 antara lain :

1. SEMA No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

3. SEMA No. 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA No. 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status Zona Merah Covid-19

Pengadilan Tinggi Riau dan satker di bawahnya tetap berupaya meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, dalam bentuk :

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Riau dan dan Pengadilan Negeri Bangkinang memperoleh penghargaan kategori terbaik lomba PTSP Dirjen Badilum Tahun 2021.
2. Penerapan aplikasi E-Court dengan fitur e-filing (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), e-summons (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi E-Court pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat saja tanpa harus datang ke pengadilan.
3. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja

Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excelance). Tahun 2021, Pengadilan Tinggi Riau dan seluruh satker diwilayah hukumnya telah diakreditasi dan memperoleh nilai akreditasi A Excellent.

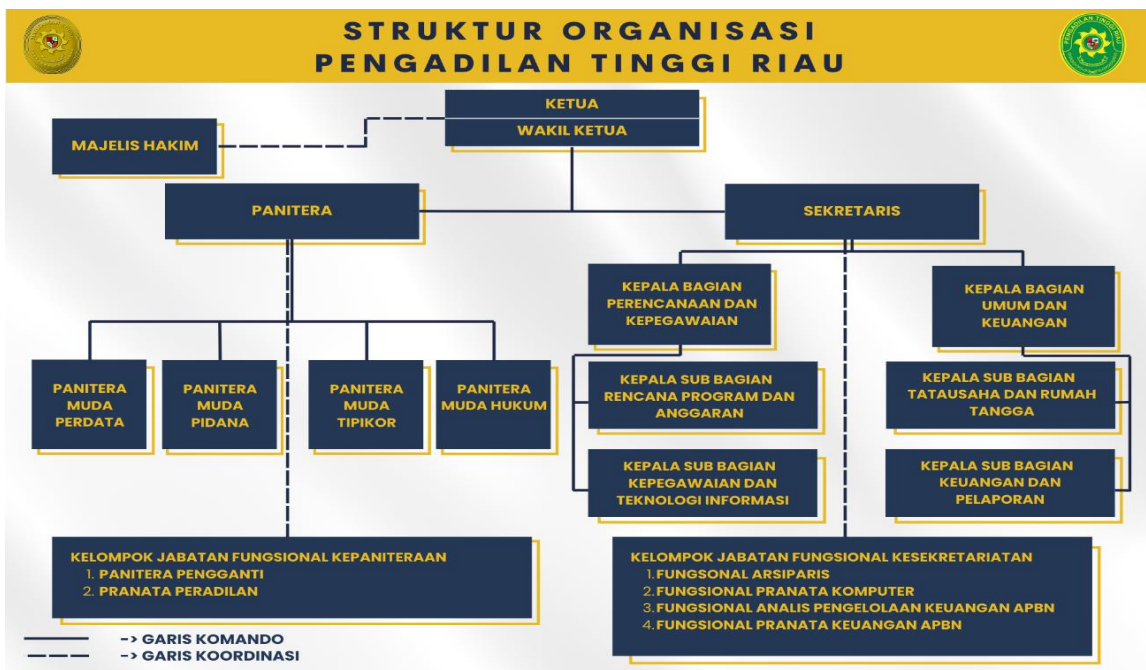
Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2021

Pengadilan Tinggi Riau dan beberapa Pengadilan Negeri dibawahnya telah mengikuti penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, walaupun belum berhasil memperoleh prsedikat WBK, kecuali Pengadilan Negeri Pekanbaru yang masih mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi sejak tahun 2019.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau



BAB II KEADAAN & PENYELESAIAN PERKARA

Pidana Cepat																
a. Sisa Tahun 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Masuk	11	49	159	36	19	30	46	105	14	21	5	31	12	-	-	
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Putus	11	49	159	36	19	30	46	105	14	21	5	31	12	-	-	
e. Sisa Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelanggaran Lalu Lintas																
a. Sisa Tahun 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Masuk	29.425	6.304	6.211	4.107	4.178	4.414	4.651	4.825	5.479	3.017	5.146	1.925	8.717	1.301	32	
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Putus	29.425	6.304	6.211	4.107	4.178	4.414	4.651	4.825	5.479	3.017	5.146	1.925	8.717	1.301	32	
e. Sisa Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pra Peradilan																
a. Sisa Tahun 2021	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
b. Masuk	16	2	4	4	5	-	2	1	6	3	2	3	7	6	-	
c. Cabut	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
d. Putus	15	1	4	4	4	-	3	2	4	2	2	3	6	3	-	
e. Sisa Tahun 2022	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
Pidana Anak																
a. Sisa Tahun 2021	-	-	1	4	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	
b. Masuk	35	16	18	17	23	15	29	18	17	2	26	19	70	6	5	
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Putus	35	16	19	16	23	15	29	18	18	2	27	19	66	6	4	
e. Sisa Tahun 2022	-	-	-	5	1	-	-	1	-	-	-	-	5	-	1	
Tipikor																
a. Sisa Tahun 2021	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	
b. Masuk	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	

c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
e. Sisa Tahun 2022	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
Perikanan															
a. Sisa Tahun 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
e. Sisa Tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tabel 2. Perkara Perdata dan Perdata Khusus Pengadilan Tingkat Pertama

Jenis Perkara	PN Pekanbaru	PN Dumai	PN Bangkinang	PN Pelalawan	PN Siak Sri Indrapura	PN Rengat	PN Bengkalis	PN Pasir Pengaraian	PN Rokan Hilir	PN Teluk Kuantan	PN Tembilahan	PN Tanjungpinang	PN Batam	PN Tanjung Balai Karimun	PN Ranai
Perdata Gugatan															
a. Sisa Tahun 2021	101	13	21	25	22	8	27	16	31	29	2	19	103	7	-
b. Masuk	327	74	96	41	77	31	53	85	59	37	21	81	358	51	6
c. Cabut	57	12	7	-	-	4	5	2	14	-	7	-	30	4	-
d. Putus	272	56	83	52	72	27	60	90	76	51	10	73	316	47	3
e. Sisa Tahun 2022	99	19	34	14	27	8	15	9	15	66	6	27	115	7	3
Perdata Permohonan															
a. Sisa Tahun 2021	13	-	-	-	2	-	6	8	4	-	-	4	21	2	-
b. Masuk	331	67	34	119	102	43	120	175	52	13	54	100	572	83	19
c. Cabut	28	11	2	-	-	1	-	1	3	2	9	-	44	8	-
d. Putus	305	56	33	119	101	42	118	179	53	11	42	101	514	74	19

e. Sisa Tahun 2022	11	1	1	-	3	-	8	3	2	-	3	3	35	3	-
Gugatan Sederhana															
a. Sisa Tahun 2021	12	2	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2	2	-
b. Masuk	57	-	17	19	5	16	10	14	8	1	15	6	34	8	-
c. Cabut	17	-	-	-	-	2	-	3	-	-	2	-	4	3	-
d. Putus	49	2	17	19	5	14	11	13	8	1	13	6	26	7	-
e. Sisa Tahun 2022	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-
Perlawanan (Derden Verzet)															
a. Sisa Tahun 2021	5	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-
b. Masuk	9	2	-	1	-	-	4	-	1	-	-	1	10	2	-
c. Cabut	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	10	-	-	-	1	-	2	1	3	-	-	1	6	-	-
e. Sisa Tahun 2022	3	2	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	6	2	-
Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)															
a. Sisa Tahun 2021	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
b. Masuk	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-
c. Cabut	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
d. Putus	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-
e. Sisa Tahun 2022	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Berikut ini rincian keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Riau tahun 2022.

Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2022	Sisa Tahun 2022	% Putus
Perdata	31	248	279	0	259	20	92,83%
Pidana Biasa	52	737	789	0	724	65	91,76%
Pidana Anak	1	29	30	0	30	0	100%
Tipikor	0	38	38	0	33	5	86,84%
Jumlah	84	1052	1136	0	1046	90	92%

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Berikut ini rincian keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi Di Th. 2022	Jumlah Perkara Kasasi Yang Putus Di Tahun 2022
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Pidana	47	28
		Perdata	50	8
		Pidana Khusus	17	-
		Perdata Khusus	52	19
2	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pidana	16	10
		Perdata	9	6
3	Pengadilan Negeri Dumai	Pidana	42	11
		Perdata	4	8
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	100	55
		Perdata	9	3
5	Pengadilan Negeri Rengat	Pidana	29	53
		Perdata	2	1
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Pidana	10	7
		Perdata	6	5
7	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Pidana	4	10
		Perdata	12	6
8	Pengadilan Negeri Tembilahan	Pidana	16	13
		Perdata	2	6
9	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Pidana	14	0

		Perdata	9	2
10	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Pidana	83	48
		Perdata	18	9
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Pidana	28	41
		Perdata	3	1
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Pidana	30	16
		Perdata	11	9
		Pidana Khusus	2	0
		Perdata Khusus	43	45
13	Pengadilan Negeri Batam	Pidana	19	24
		Perdata	52	19
14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Pidana	12	8
		Perdata	5	1
15	Pengadilan Negeri Ranai	Pidana	5	3
		Perdata	0	0

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Berikut ini rincian keadaan perkara Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 5.Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No.	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Di Th. 2022	Jumlah Perkara Peninjauan Kembali (PK) Yang Putus Di Tahun 2022
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Pidana	44	18
		Perdata	24	4
		Pidana Khusus	10	-
		Perdata Khusus	-	-
2	Pengadilan Negeri Dumai	Pidana	11	2
		Perdata	3	3
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pidana	13	13
		Perdata	2	3
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	13	9
		Perdata	1	2
5	Pengadilan Negeri Rengat	Pidana	17	9
		Perdata	0	0
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Pidana	19	7
		Perdata	5	2

7	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Pidana	2	3
		Perdata	3	1
8	Pengadilan Negeri Tembilahan	Pidana	5	0
		Perdata	0	1
9	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Pidana	0	0
		Perdata	0	0
10	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Pidana	87	39
		Perdata	2	4
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Pidana	1	1
		Perdata	1	0
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Pidana	1	2
		Perdata	1	5
		Pidana Khusus	0	0
		Perdata Khusus	0	0
13	Pengadilan Negeri Batam	Pidana	5	6
		Perdata	19	11
14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Pidana	2	0
		Perdata	1	0
15	Pengadilan Negeri Ranai	Pidana	0	0
		Perdata	0	0

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum

Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2021 yang diputus Tahun 2022

Tabel 6. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa Perkara TH. 2021	Sisa Perkara TH. 2021 Yang Diputus TH. 2022	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
Perdata	31	31	100%
Pidana Biasa	52	52	100%
Pidana Anak	1	1	100%
Tipikor	0	0	-
Jumlah	84	84	100%

Tabel 7. Jumlah sisa perkara Pidana Tingkat Pertama yang diputus tahun 2022

No	Satuan Kerja	Pidana			Pidana Khusus		
		Sisa Perkara Th. 2021	Sisa Perkara Th. 2021 yang diselesaikan tahun 2022	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	Sisa Perkara Th. 2021	Sisa Perkara Th. 2021 yang diselesaikan tahun 2022	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
1	PN Pekanbaru	100	100	100%	94	94	100%

2	PN Dumai	9	9	100%	13	13	100%
3	PN Bangkinang	101	101	100%	1	1	100%
4	PN Pelalawan	32	32	100%	4	4	100%
5	PN Siak	46	46	100%	1	1	100%
6	PN Rengat	28	28	100%	0	0	-
7	PN Bengkalis	127	127	100%	1	1	100%
8	PN Pasir Pengaraian	28	28	100%	1	1	100%
9	PN Rokan Hilir	104	104	100%	1	1	100%
10	PN Tembilahan	43	43	100%	1	1	100%
11	PN Teluk Kuantan	43	43	100%	0	0	-
12	PN Tanjung Pinang	65	65	100%	14	14	100%
13	PN Batam	90	90	100%	1	1	100%
14	PN Tanjung Balai Karimun	12	12	100%	33	33	100%
15	PN Ranai	0	0	100%	0	0	100%
Jumlah		828	828	1	165	165	100%

Tabel 8. Jumlah sisa perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama yang diputus tahun 2022

No	Satuan Kerja	Perdata			Perdata Khusus		
		Sisa Perkara Th. 2021	Sisa Perkara Th. 2021 yang diselesaikan tahun 2022	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	Sisa Perkara Th. 2021	Sisa Perkara Th. 2021 yang diselesaikan tahun 2022	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
1	PN Pekanbaru	131	131	100%	16	16	100%
2	PN Dumai	13	13	100%	0	0	-
3	PN Bangkinang	21	21	100%	0	0	-
4	PN Pelalawan	25	25	100%	0	0	-
5	PN Siak	24	24	100%	0	0	-
6	PN Rengat	8	8	100%	0	0	-
7	PN Bengkalis	34	34	100%	0	0	-
8	PN Pasir Pengaraian	29	29	100%	0	0	-
9	PN Rokan Hilir	34	34	100%	0	0	-
10	PN Tembilahan	2	2	100%	0	0	-
11	PN Teluk Kuantan	29	29	100%	0	0	-
12	PN Tanjung Pinang	23	23	100%	18	18	100%
13	PN Batam	128	128	100%	0	0	-
14	PN Tanjung Balai Karimun	7	7	100%	0	0	-
15	PN Ranai	0	0	100%	0	0	100%
Jumlah		508	508	100%	34	34	100%

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, batas penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan maksimal 5 bulan untuk penyelesaian perkara di

pengadilan tingkat pertama. Berikut ini rincian jumlah perkara di Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 9. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang diputus tepat waktu

Perkara	Jumlah Perkara Putus Th. 2022	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
Pidana Biasa	724	724	0	100%
Pidana Anak	30	30	0	100%
Perdata	259	259	0	100%
Tipikor	33	33	0	100%
Jumlah	1046	1046	0	100%

Tabel 10. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu

No	Satuan Kerja	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Th. 2022	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Pidana	1212	1210	2	99,80%
		Perdata	739	660	79	89,30%
		Pidana Khusus	105	84	0	100,00%
		Perdata Khusus	64	47	17	73,43%
2	Pengadilan Negeri Dumai	Pidana	219	219	0	100,00%
		Perdata	56	54	2	98,00%
		Pidana Khusus	180	180	0	100,00%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Pidana	875	875	0	100,00%
		Perdata	133	115	18	86,50%
		Pidana Khusus	19	19	0	100,00%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	778	777	1	99,90%
		Perdata	191	185	6	96,90%
		Pidana Khusus	29	29	0	100,00%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Pidana	604	604	0	100,00%
		Perdata	75	70	5	93,30%

		Pidana Khusus	18	18	0	100,00%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Pidana	358	358	0	100,00%
		Perdata	190	187	3	98,42%
		Pidana Khusus	16	16	0	100,00%
7	Pengadilan Negeri Rengat	Pidana	296	296	0	100,00%
		Perdata	83	83	0	100,00%
		Pidana Khusus	15	15	0	100,00%
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Pidana	463	463	0	100,00%
		Perdata	90	90	0	100,00%
		Pidana Khusus	18	18	0	100,00%
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	Pidana	301	301	0	100,00%
		Perdata	83	81	2	97,59%
		Pidana Khusus	27	27	0	100,00%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Pidana	348	348	0	100,00%
		Perdata	179	172	7	96,10%
		Pidana Khusus	23	23	0	100,00%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Pidana	153	153	0	100,00%
		Perdata	58	58	0	100,00%
		Pidana Khusus	0	0	0	-
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Pidana	347	347	0	100,00%
		Perdata	177	174	3	98,30%
		Pidana Khusus	43	43	0	100,00%
		Perdata Khusus	58	5	53	8,60%
13	Pengadilan Negeri Batam	Pidana	577	577	0	100,00%
		Perdata	940	808	132	86,00%
		Pidana Khusus	65	65	0	100,00%
14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Pidana	52	52	0	100,00%
		Perdata	47	43	4	91,50%
		Pidana Khusus	159	159	0	100,00%
15	Pengadilan Negeri Ranai	Pidana	97	97	0	100,00%
		Perdata	22	22	0	100,00%
		Pidana Khusus	6	6	0	100,00%
		Perdata Khusus	4	4	0	100,00%

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PK

Berikut ini rincian jumlah perkara di tahun 2022 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022

yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tabel 11. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Perkara PN Yang Putus Th. 2022 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Perkara PN Yang Putus Th. 2022 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Perkara PN Yang Putus Th. 2022 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PN Pekanbaru	Pidana	1.247	1.148	92,00%	1.226	98,30%	1.244	99,70%
		Perdata	739	661	89,40%	689	93,00%	715	96,70%
		Pidana Khusus	70	40	57,14%	55	78,57%	70	100,00%
		Perdata Khusus	64	0	-	52	81,30%	0	-
2	PN Dumai	Pidana	219	212	96,80%	214	97,70%	218	99,50%
		Perdata	56	50	89,30%	0	0,00%	0	0,00%
		Pidana Khusus	180	133	73,80%	143	79,40%	169	93,80%
3	PN Bangkinang	Pidana	875	842	96,20%	859	98,20%	862	98,50%
		Perdata	133	118	88,70%	124	93,20%	131	98,50%
		Pidana Khusus	19	18	94,70%	19	100,00%	19	100,00%
4	PN Bengkalis	Pidana	778	645	82,90%	703	90,40%	776	99,70%
		Perdata	191	186	97,40%	186	97,40%	191	100,00%
		Pidana Khusus	29	25	86,20%	27	93,10%	29	100,00%
5	PN Rengat	Pidana	296	251	84,80%	267	90,20%	279	94,30%
		Perdata	23	17	73,90%	22	95,70%	23	100,00%
		Pidana Khusus							
6	PN Pasir Pangaraian	Pidana	463	448	96,80%	459	99,10%	463	100,00%
		Perdata	90	76	84,40%	78	86,70%	90	100,00%
		Pidana Khusus	18	18	100,00%	18	100,00%	18	100,00%
7	PN Tembilahan	Pidana	335	302	90,10%	319	95,20%	330	98,50%
		Perdata	65	64	98,50%	63	96,90%	65	100,00%
		Pidana Khusus							
8	PN Pelalawan	Pidana	398	372	93,46%	388	97,48%	379	95,22%
		Perdata	190	180	94,73%	184	96,84%	185	97,36%
		Pidana Khusus	16	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	PN Siak Sri Indrapura	Pidana	348	322	92,50%	337	96,80%	0	0,00%
		Perdata	179	166	92,70%	170	95,00%	0	0,00%
		Pidana Khusus	23	19	82,60%	20	87,00%	0	0,00%

10	PN Rokan Hilir	Pidana	623	479	76,90%	540	86,70%	536	86,00%
		Perdata	51	29	56,90%	32	62,70%	49	96,10%
		Pidana Khusus	18	18	100,00%	18	100,00%	18	100,00%
11	PN Teluk Kuantan	Pidana	153	115	75,20%	10	26,30%	152	99,30%
		Perdata	58	54	93,10%	57	98,20%	58	100,00%
		Pidana Khusus	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12	PN Tanjung Pinang	Pidana	290	309	93,90%	334	92,50%	0	0,00%
		Perdata	73	58	79,50%	52	71,20%	72	98,60%
		Pidana Khusus	43	36	83,70%	41	95,30%	43	100,00%
		Perdata Khusus	58	0	0,00%	17	29,30%	0	0,00%
13	PN Batam	Pidana	577	541	93,80%	568	98,40%	577	100,00%
		Perdata	940	889	94,60%	888	94,50%	924	98,30%
		Pidana Khusus	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
14	PN Tanjung Balai Karimun	Pidana	52	45	86,50%	48	92,30%	52	100,00%
		Perdata	47	41	87,20%	42	89,40%	0	0,00%
		Pidana Khusus	159	141	88,70%	151	94,80%	159	100,00%
15	PN Ranai	Pidana	65	55	84,62%	60	92,30%	65	100,00%
		Perdata	3	3	100,00%	3	100,00%	3	100,00%
		Pidana Khusus	6	5	83,33%	5	83,33%	6	100,00%

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan

penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Berikut ini jumlah perkara perdata tahun 2022 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022 yang berhasil mediasi.

Tabel 12. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi Th. 2022	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	235	24	197	3	11
2	Pengadilan Negeri Dumai	73	3	68	0	2
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	35	5	27	1	2
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	22	2	17	2	1

5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	30	0	15	13	2
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	34	3	26	4	1
7	Pengadilan Negeri Rengat	2	2	19	0	0
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	31	2	26	2	1
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	11	1	8	2	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	42	1	40	1	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	28	6	21	1	0
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	43	5	38	0	0
13	Pengadilan Negeri Batam	155	12	139	2	2
14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	23	2	21	0	0
15	Pengadilan Negeri Ranai	1	1	0	2	3
Jumlah		765	69	662	33	25

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA"). Berikut ini jumlah perkara pidana anak tahun 2022 Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022 yang berhasil melakukan diversifikasi.

Tabel 13. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak Th. 2022	Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diversifikasi Th. 2022	Status Keberhasilan Diversifikasi			Dalam Proses
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	35	13	9	4	0	0
2	Pengadilan Negeri Dumai	0	0	0	0	0	0
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	19	4	0	4	0	0
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	29	8	5	3	0	0
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	17	17	0	17	0	0
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	17	4	2	2	13	0
7	Pengadilan Negeri Rengat	15	6	4	2	0	0
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	18	12	6	6	0	0
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	27	11	7	4	0	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	23	1	1	0	0	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2	0	0	0	0	0
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	19	0	0	0	19	0
13	Pengadilan Negeri Batam	72	0	0	0	0	0

14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	6	0	0	0	6	0
15	Pengadilan Negeri Ranai	5	0	0	0	5	0
Jumlah		304	76	34	42	43	0

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO DIPENGADILAN)

1. POSBAKUM

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan

advice hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun pada tahun 2022.

Tabel 14. Posbakum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum (Rp.)	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (orang)
			(Rp.)	(%)	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Rp 38.400.000	Rp 37.800.000	98%	63
2	Pengadilan Negeri Dumai	Rp 31.200.000	Rp 31.200.000	100%	46
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Rp 31.200.000	Rp 31.200.000	100%	526
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Rp 31.200.000	Rp 31.200.000	100%	64
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Rp 49.800.000	Rp 49.800.000	100%	525
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	149
7	Pengadilan Negeri Rengat	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	240
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	167
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	22
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	72
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100%	23
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Rp 28.600.000	Rp 28.600.000	100%	171
13	Pengadilan Negeri Batam	Rp 38.400.000	Rp 32.000.000	83,33%	194
14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000	100%	44
15	Pengadilan Negeri Ranai	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000	100%	30
Jumlah		Rp433.600.000	Rp 426.600.000	98%	2336

2. SIDANG KELILING/LAYANAN TERPADU

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan

mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala tersebut digalakkan program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam

memperoleh keadilan. Berikut data layanan sidang di luar gedung

Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022

Tabel 15. Sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Zitting Plaatz	Lokasi Sidang Zitting Plaatz	Jumlah Perkara Diselesaikan Di Zitting Plaatz Th. 2022
1	Pengadilan Negeri Bengkalis	2	Duri, Mandau	0
			Selatpanjang, Kab Kepulauan Meranti	182
2	Pengadilan Negeri Tanjungpinang	1	Dabo Singkep	10

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses

berperkara di pengadilan. Berikut data Prodeo pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 16. Perkara prodeo di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Th. 2022	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp.)	Realisasi Anggaran Prodeo	
				(Rp.)	(%)
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	56	Rp90.920.000	Rp84.508.000	92,95%
2	Pengadilan Negeri Dumai	0	0	0	-
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	0	0	0	-
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	0	0	0	-
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0	0	0	-
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	0	0	0	-
7	Pengadilan Negeri Rengat	0	0	0	-
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0	0	0	-
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	0	0	0	-
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	0	0	0	-
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0	0	0	-
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	0	0	0	-
13	Pengadilan Negeri Batam	1	Rp1.653.000	Rp240.000	14,51%
14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	0	0	0	-
15	Pengadilan Negeri Ranai	0	0	0	-
Jumlah		57	Rp 92.573.000	Rp 84.748.000	92%



PENGADILAN TINGGI RIAU

BAB III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada beberapa pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2022 mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi, namun masih ada Pengadilan Negeri yang mengalami

kekosongan pada beberapa formasi jabatan dan kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga staf atau pelaksana. Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022

1. SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TINGGI RIAU

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022 sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) orang Hakim dan

Pegawai dan 7 (tujuh) orang tenaga honorer/PPNPN. Rincian sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Riau dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Riau

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.	Ketua	
2	Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	
4	NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
5	BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
6	KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	
7	IMAN GULTOM, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
8	DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum	Hakim Tinggi	
9	ASWIJON, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
10	ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
11	H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Jumlah Hakim Tinggi 23 Orang
12	ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
13	LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
14	JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
15	SETIA RINA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
16	Hj. DAHMIWIRDA D., S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
17	YUS ENIDAR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
18	YUZAIDA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
19	JON EFFREDDI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
20	ADMIRAL, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
21	Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
22	SRI ENDANG AMPERAWATI NINGSIH, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	

23	LILIN HERLINA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
24	Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
25	TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor	Jumlah Hakim Adhoc 3 Orang
26	Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor	
27	HENDRI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor	
28	TJATUR WAHJOE B.S.P., S.H., M.Hum	Panitera	
29	T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP., M.M.	Sekretaris	
30	JUNI DWIANTI, S.SI.,M.H	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
31	ROBY HIDAYAT, S.T.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
32	IDA AYU NGURAH R, S.H. M.H	Panitera Muda Perdata	Jumlah Pejabat Struktural 11 Orang
33	DIYAH FAJAR SARI, S.H	Panitera Muda Hukum	
34	M. JAMALIS, S.H.	Panitera Muda Pidana	
35	YUSNIDAR, S.H	Panitera Muda Tipikor	
36	DERSIMA HARAHAHAP, S.E	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	
37	ROMA TUA JUWYTA SIHOMBING, S.E	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	
38	MUHADI, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
39	YUNITA BANGUN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
40	HJ.NURFATMAWATY, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
41	NASIB SAGALA, S.H.	Panitera Pengganti	
42	DES SURYA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
43	HASAN BASRI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti Sebanyak 23 Orang
44	BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
45	RUSTAM, S.H.	Panitera Pengganti	
46	SANTOSO, S.H.	Panitera Pengganti	
47	EFRIZAL, S.H.	Panitera Pengganti	
48	JONATHAN SINAGA, S.H.	Panitera Pengganti	
49	UKURKEN GINTING, S.H.	Panitera Pengganti	
50	AMRI WAHAB, S.H.	Panitera Pengganti	
51	ALIAMAN, S.H.	Panitera Pengganti	
52	TETI ANGGRAINI, S.H.	Panitera Pengganti	
53	USMAN, S.H.	Panitera Pengganti	
54	HERMINA SILABAN, S.H.	Panitera Pengganti	
55	AMIRIN, S.H.	Panitera Pengganti	
56	MF. EVA JUNIAR SIMAMORA, S.H	Panitera Pengganti	
57	HJ. ROSVIATI, S.H.	Panitera Pengganti	
58	SUNARIYAH, S.H.	Panitera Pengganti	
59	SINTA HERAWATI, S.H.	Panitera Pengganti	
60	PARINGATAN SARAGIH, S.H.	Panitera Pengganti	
61	AZWIR, S.H.	Panitera Pengganti	
62	SUYATNO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	

63	INDAH MUHARANI, S.T.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Jumlah Fungsional Tertentu 6 orang	
64	SESILIYA RAHAYU, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia		
65	FADHLIAMIN, S.SI.	Pranata Komputer Ahli Pertama		
66	MELGISAPUTRA DWI NANDA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama		
67	FARIDA ISTIQOMAH, A.Md.	Arsiparis Pelaksana		
68	TRİYANTI DYAH PERTIWI, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana		
69	MELLA ROSARIA INDAH, S.H.	Tenaga Non Teknis	Jumlah Tenaga non Teknis 18 orang	
70	JUSNIWATI,	Tenaga Non Teknis		
71	BETHARIA OKTAVIANI, S.E.	Tenaga Non Teknis		
72	EKA CHITRA MURVIRIANTI, S.E.	Tenaga Non Teknis		
73	DARWIS, S.KOM.	Tenaga Non Teknis		
74	ANDI ANUGRA, S.H.	Tenaga Non Teknis		
75	ISRA FILONA, S.H.	Tenaga Non Teknis		
76	MANASE SIAHAAN, S.H., M.H.	Tenaga Non Teknis		
77	ROMMY SAPUTRA, S.E.	Tenaga Non Teknis		
78	KAMALUDDIN,	Tenaga Non Teknis		
79	PERMAIZAL,	Tenaga Non Teknis		
80	KATARINA HUTAPEA,	Tenaga Non Teknis		
81	FAJRUL AMNI,	Tenaga Non Teknis		
82	TUSIRAN,	Tenaga Non Teknis		
83	ADETIA PRATAMA, A.MD.	Tenaga Non Teknis		
84	AMALIA KHOIRUNNISA, S.H.	Tenaga Non Teknis		
85	YUDI OKTAVIANUS, S.E	Tenaga Non Teknis		Jumlah Tenaga PPNPN 7 Orang
86	FELIN STEFANI LUMBANTOBING, A.MD	Tenaga Non Teknis		
87	SAMIDI	Tenaga Honorer		
88	SYAHRIR	Tenaga Honore		
89	MUDORI	Tenaga Honore		
90	ROTAL NGALAMIN	Tenaga Honorer		
91	HADI SUTANTO, S.H., M.H.	Tenaga Honorer		
92	NUROKHIM, S.H.	Tenaga Honorer		
93	SAMBUDI	Tenaga Honorer		

2. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU

Rincian jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. SDM Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau

No	Unit Kerja	JUMLAH SDM														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1.	2.	3.	4.
		PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN
		Pekanbaru	Dumai	Bangkinang	Bengkalis	Rokan Hilir	Pelalawan	Rengat	Pasir Pengaraian	Tembilahan	Siak Sri Indrapura	Teluk Kuantan	TG. Pinang	Batam	Tj. Balai Karimun	Rancai
	Jumlah Personil	83	41	51	43	25	29	25	37	36	32	33	53	76	35	33
1	Ketua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Wakil Ketua	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
3	Hakim	11	8	11	8	5	8	6	8	6	4	6	8	14	6	5
4	Hakim Adhoc Tipikor	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-
5	Hakim Adhoc PHI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	-
6	Hakim Adhoc Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	5
7	Panitera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Wakil Panitera	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
9	Panmud Pidana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Panmud Perdata	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
11	Panmud Hukum	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	-
12	Panmud Tipikor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-
13	Panmud PHI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14	Panmud Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-
15	Panitera Pengganti	15	5	5	3	2	1	1	1	1	1	0	2	9	1	-
16	Jurusita/Jurusita Pengganti	10	4	2	3	1	2	1	4	2	3	3	7	7	2	-
17	Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
18	KA. Sub. Bag PTIP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	-
19	Ka. Sub. Bag Umum Dan Keuangan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
20	Ka. Sub. Bag Kepegawaian Dan Ortala	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	-
21	Tenaga Non Teknis	12	2	13	9	7	3	8	8	7	8	5	10	14	5	9
22	Tenaga Honorer	17	13	9	11	9	12	1	8	12	7	11	13	22	12	9

3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN

Jumlah Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022

sebanyak 452 Orang, Berikut rincian Jumlah hakim dan pegawai berdasarkan kelompok Golongan.

Tabel 19. SDM berdasarkan kelompok Golongan

No	Satuan Kerja	Golongan IV (orang)	Golongan III (orang)	Golongan II (orang)	Golongan I (orang)
1	Pengadilan Tinggi Riau	36	41	6	0
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	16	38	6	0
3	Pengadilan Negeri Dumai	11	20	4	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	3	33	5	0
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	3	23	6	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	2	19	4	0
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	2	4	1	0
8	Pengadilan Negeri Rengat	3	18	4	0
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2	21	6	0
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	2	17	5	0
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	2	20	3	0
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2	16	4	0
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	11	19	8	1
14	Pengadilan Negeri Batam	22	27	7	0
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	2	19	3	0
48	Pengadilan Negeri Ranai	1	13	4	0
6					
Jumlah		84	348	76	1

4. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN

Berikut rincian Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan

Tinggi Riau Tahun 2022 berdasarkan kelompok Pendidikan Tahun 2022.

Tabel 20. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan PT Riau

No	Satuan Kerja	Tingkat Pendidikan						
		S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA
1	Pengadilan Tinggi Riau	3	33	40	4	0	0	5
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	1	19	37	5	0	0	4
3	Pengadilan Negeri Dumai	0	8	19	5	0	0	3
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	0	13	22	5	0	0	1
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	0	3	19	7	0	0	3
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0	2	20	3	0	0	1
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	0	12	18	1	0	0	1
8	Pengadilan Negeri Rengat	0	5	14	3	0	0	3
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0	5	17	4	0	0	3
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	0	2	14	4	0	0	4

11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	0	5	19	2	0	0	6
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0	5	7	5	4	0	1
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	0	16	22	5	0	0	8
14	Pengadilan Negeri Batam	0	16	24	6	0	0	8
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	0	2	19	2	0	0	1
16	Pengadilan Negeri Ranai	2	4	14	4	0	0	8
Jumlah		6	150	325	65	4	0	60

5. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung Telah memberikan tanda penghargaan kepada Hakim dan pegawai Mahkamah Agung yang telah berbakti selama 8 tahun, 16 Tahun, 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun lebih secara terus menerus dengan

menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian. Berikut rincian jumlah penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 21. Penghargaan Satya Lencana

NO	SATUAN KERJA	PENGHARGAAN				
		SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX (ORANG)	SATYA LENCANA KARYA SATYA XX (ORANG)	SATYA LENCANA KARYA SATYA X (ORANG)	KARYA SATYA SEWINDU (ORANG)	KARYA SATYA DWI WINDU (ORANG)
1	Pengadilan Tinggi Riau	2	1	0	0	4
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	6	11	16	1	13
3	Pengadilan Negeri Dumai	1	2	0	0	1
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	2	1	0	0	2
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	1	0	0	1	1
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0	0	0	0	2
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	0	0	1	0	2
8	Pengadilan Negeri Rengat	1	0	0	0	0
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	1	0	0	2	1
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	1	1	0	1	0
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	0	0	0	0	0
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	1	0	0	0	0
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	0	3	0	0	2
14	Pengadilan Negeri Batam	3	3	0	0	6
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	0	0	0	1	0
16	Pengadilan Negeri Ranai	0	0	0	1	0
Jumlah		19	22	17	7	34

B. PROMOSI & MUTASI

Berikut rincian promosi dan mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022 .

Tabel 22. Mutasi masuk PT Riau

No.	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Dari)
1	H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.	Ketua	PT. Banjarmasin
2	Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	PT. Padang
3	NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Bandung
4	SETIA RINA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Bangka Belitung
5	Hj. DAHMIWIRDA D., S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Bengkulu
6	YUS ENIDAR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Banda Aceh
7	YUZAIDA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PN Padang
8	SRI ENDANG AMPERAWATI NINGSIH, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PN Batam
9	Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PN Gorontalo
10	LILIN HERLINA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PN Jambi
11	YUNITA BANGUN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	PN Stabat
12	BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	PN Tanjung Pinang
13	JONATHAN SINAGA, S.H.	Panitera Pengganti	PN Simalungun
14	HERMINA SILABAN, S.H.	Panitera Pengganti	PN Lhokseumawe
15	AMIRIN, S.H.	Panitera Pengganti	PN Pekanbaru
16	PARINGATAN SARAGIH, S.H.	Panitera Pengganti	PN Pematang Siantar
17	AZWIR, S.H.	Panitera Pengganti	PN Teluk Kuantan
18	SUYATNO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	PN Batam
19	ROMA TUA JUWYTA SIHOMBING, S.E.	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	PN Bangkinang
20	FADHLIAMIN, S.SI.	Pranata Komputer	PTA Padang
21	ROMMY SAPUTRA, S.E.	Analisis Humas	PN Dumai

Tabel 23. Mutasi Keluar dari PT Riau

No.	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Keluar ke)
1	Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.	Ketua	PT. Medan
2	ROKI PANJAITAN, S.H.	Wakil Ketua	PT. Gorontalo
3	Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Bandung
4	H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT. Medan
5	MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	PT. Medan
6	BISKER MANIK, S.Sos., M.H.	Panitera Pengganti	PT. Medan
7	BAHARI SIREGAR, S.H.	Panitera Pengganti	PT. Medan
8	BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	PT. Kepulauan Riau
9	NUR FATMAWATY, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	PT. Kepulauan Riau

Tabel 24. Promosi & Mutasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau

No	Satuan Kerja	Jabatan	Jumlah Promosi / Mutasi Masuk (Orang)	Jumlah Promosi / Mutasi Keluar (Orang)
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Hakim Karir	7	4
		Hakim Adhoc	1	0
		Stuktural (Non Hakim)	1	2
		Fungsional	1	0
		Pelaksana	6	0
2	Pengadilan Negeri Dumai	Hakim Karir	2	1
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	1	0
		Fungsional	2	0
		Pelaksana	0	1
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Hakim Karir	1	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	0	1
		Fungsional	0	2
		Pelaksana	7	0
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	Hakim Karir	1	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	2	2
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	7	0
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Hakim Karir	2	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	0	0
		Fungsional	1	2
		Pelaksana	0	0
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	Hakim Karir	3	5
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	0	1
		Fungsional	2	4
		Pelaksana	3	0
7	Pengadilan Negeri Rengat	Hakim Karir	2	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	1	0
		Fungsional	2	0
		Pelaksana	4	0
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Hakim Karir	2	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	1	0
		Fungsional	2	0
		Pelaksana	5	0
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	Hakim Karir	3	1
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	0	1
		Fungsional	2	0

		Pelaksana	4	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Hakim Karir	5	3
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	1	1
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Hakim Karir	1	2
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	1	2
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	0	0
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Hakim Karir	3	10
		Hakim Adhoc	4	0
		Stuktural (Non Hakim)	5	6
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	6	1
13	Pengadilan Negeri Batam	Hakim Karir	3	6
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	2	2
		Fungsional	0	1
		Pelaksana	8	0
14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Hakim Karir	1	1
		Hakim Adhoc	0	0
		Stuktural (Non Hakim)	0	0
		Fungsional	0	0
		Pelaksana	3	0
15	Pengadilan Negeri Ranai	Hakim Karir	1	1
		Hakim Adhoc	1	0
		Stuktural (Non Hakim)	0	1

C. PENSIUN

Berikut rincian pensiun Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri sewilayah hukum pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 25. Pensiun di Pengadilan Tinggi Riau

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dasniel, S.H., M.H	Hakim Tinggi	Pensiun Normal
2.	Azwar, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun Normal
3.	Harmi Jaya, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun Normal
4.	Ukurken Ginting, S.H	Panitera Pengganti	Pensiun Normal
5.	Amri Wahab, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun Normal
6.	Nursakdiah	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Pensiun Normal

Tabel 26. Pensiun Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Pensiun di Tahun 2022
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	6
2	Pengadilan Negeri Dumai	2
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	2
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	1
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	0
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	0
7	Pengadilan Negeri Rengat	1
8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	0
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	0
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	0
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	0
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	4
13	Pengadilan Negeri Batam	0
14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	0
15	Pengadilan Negeri Ranai	0
Jumlah		16

D. DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia teknis peradilan dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode untuk mewujudkan tenaga teknis dan non teknis peradilan yang profesional, berintegritas dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi ini

diarahkan untuk meningkatnya kualitas penyelenggaraan, peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap badan peradilan.

Berikut rincian jumlah hakim dan pegawai yang mengikuti diklat teknis dan diklat menpin pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 27. Jumlah mengikuti diklat teknis dan non teknis

No.	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis	Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Non Teknis
1	Pengadilan Tinggi Riau	2	1
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	30	7
3	Pengadilan Negeri Dumai	11	2
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	14	16
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	8	11
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	7	7
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	8	12
8	Pengadilan Negeri Rengat	8	8
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	13	0
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	5	27

11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	9	10
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	5	0
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	21	10
14	Pengadilan Negeri Batam	36	0
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	6	0
16	Pengadilan Negeri Ranai	8	14
Jumlah		262	149



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKHNOLOGI INFORMASI

BAB IV

MANAJEMEN KEUANGAN, ASET, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi anggaran dan pengelolaan PNBP Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi

Riau Tahun 2022 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

1. REALISASI DIPA 01

Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Satuan Kerja	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				Rp.	%	Rp.	%
1	Pengadilan Tinggi Riau	Belanja Pegawai	Rp 18.964.480.000	Rp 18.929.044.821	99,80%	Rp 35.435.179	0,20%
		Belanja Barang	Rp 5.094.087.000	Rp 5.093.663.257	100,00%	Rp 423.743	0,00%
		Belanja Modal	Rp 453.500.000	Rp 453.498.600	100,00%	Rp 1.400	0,00%
		Total	Rp 24.512.067.000	Rp 24.476.206.678	99,90%	Rp 35.860.322	0,10%
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Belanja Pegawai	Rp 9.539.710.000	Rp 9.499.907.487	99,60%	Rp 39.802.513	0,40%
		Belanja Barang	Rp 2.751.193.000	Rp 2.682.185.654	97,50%	Rp 69.007.346	2,50%
		Belanja Modal	Rp 395.130.000	Rp 375.994.760	95,20%	Rp 19.135.240	4,80%
		Total	Rp 12.686.033.000	Rp 12.558.087.901	99,00%	Rp 127.945.099	1%
3	Pengadilan Negeri Dumai	Belanja Pegawai	Rp 5.141.364.000	Rp 5.122.831.334	99,60%	Rp 18.532.666	0,40%
		Belanja Barang	Rp 2.060.436.000	Rp 2.034.290.769	98,70%	Rp 26.145.231	2,30%
		Belanja Modal	Rp 250.500.000	Rp 249.990.579	99,80%	Rp 509.421	0,20%
		Total	Rp 7.452.300.000	Rp 7.407.112.682	99,40%	Rp 45.187.318	0,60%
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Belanja Pegawai	Rp 5.774.128.000	Rp 5.754.552.544	99,70%	Rp 19.575.456	0,30%
		Belanja Barang	Rp 1.600.595.000	Rp 1.584.708.523	99,00%	Rp 15.886.477	1,00%
		Belanja Modal	Rp 5.278.521.000	Rp 5.250.571.897	99,50%	Rp 27.949.103	0,50%
		Total	Rp 12.653.244.000	Rp 12.589.832.964	99,50%	Rp 63.411.036	0,50%
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Belanja Pegawai	Rp 3.713.085.000	Rp 3.697.144.620	99,57%	Rp 15.940.380	0,40%
		Belanja Barang	Rp 1.808.439.000	Rp 1.795.326.778	99,27%	Rp 13.112.225	0,70%
		Belanja Modal	Rp 141.500.000	Rp 140.496.000	99,29%	Rp 1.004.000	0,70%
		Total	Rp 5.663.024.000	Rp 5.632.967.398	99,47%	Rp 30.056.602	0,50%
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Belanja Pegawai	Rp 2.788.382.000	Rp 2.776.594.971	99,60%	Rp 11.787.029	0,40%
		Belanja Barang	Rp 1.560.039.000	Rp 1.558.776.098	99,90%	Rp 1.262.902	0,10%
		Belanja Modal	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000	100,00%	-	0,00%

		Total	Rp 4.385.421.000	Rp 4.372.371.069	99,70%	Rp 13.049.931	0,30%
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Belanja Pegawai	Rp 4.141.913.000	Rp 4.138.080.621	99,90%	Rp 3.832.379	0,10%
		Belanja Barang	Rp 1.710.679.000	Rp 1.699.675.816	99,40%	Rp 11.003.182	0,60%
		Belanja Modal	Rp 73.500.000	Rp 73.130.000	99,50%	Rp 370.000	0,50%
		Total	Rp 5.926.092.000	Rp 5.910.886.437	99,70%	Rp 15.205.561	0,30%
8	Pengadilan Negeri Rengat	Belanja Pegawai	Rp 2.688.169.000	Rp 2.660.665.999	99,00%	Rp 27.498.000	1,00%
		Belanja Barang	Rp 1.619.267.000	Rp 1.440.324.107	89,00%	Rp 178.942.893	11,00%
		Belanja Modal	Rp 23.500.000	Rp 21.034.000	89,51%	Rp 2.466.000	9,90%
		Total	Rp 4.330.931.000	Rp 4.122.024.106	95,20%	Rp 208.906.893	4,80%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Belanja Pegawai	Rp 3.388.058.000	Rp 3.351.569.571	98,90%	Rp 36.488.429	1,10%
		Belanja Barang	Rp 1.454.554.000	Rp 1.297.703.167	89,20%	Rp 156.850.833	10,80%
		Belanja Modal	Rp 74.713.000	Rp 74.713.000	100%	-	0,00%
		Total	Rp 4.917.325.000	Rp 4.723.985.738	96,10%	Rp 193.339.262	3,90%
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Belanja Pegawai	Rp 2.367.145.000	Rp 2.337.263.032	98,70%	Rp 29.881.968	1,30%
		Belanja Barang	Rp 1.607.429.000	Rp 1.603.008.564	99,70%	Rp 4.420.436	0,30%
		Belanja Modal	Rp 73.500.000	Rp 73.199.000	99,60%	Rp 301.000	0,40%
		Total	Rp 4.048.074.000	Rp 4.012.470.596	99,20%	Rp 34.603.404	0,80%
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Belanja Pegawai	Rp 2.711.309.000	Rp 2.686.216.057	99,10%	Rp 25.092.943	0,90%
		Belanja Barang	Rp 1.558.228.000	Rp 1.541.771.591	98,90%	Rp 16.456.409	1,06%
		Belanja Modal	Rp 37.000.000	Rp 36.398.000	98,37%	Rp 602.000	1,63%
		Total	Rp 4.306.537.000	Rp 4.264.385.648	99,00%	Rp 42.151.352	1,00%
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Belanja Pegawai	Rp 2.590.917.000	Rp 2.573.687.352	99,33%	Rp 17.229.648	0,60%
		Belanja Barang	Rp 1.587.609.000	Rp 1.585.743.681	99,90%	Rp 1.865.319	0,10%
		Belanja Modal	Rp 2.550.368.000	Rp 2.549.864.299	99,98%	Rp 503.701	0,01%
		Total	Rp 6.728.894.000	Rp 6.709.295.332	99,70%	Rp 19.598.668	0,29%
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Belanja Pegawai	Rp 10.127.769.000	Rp 9.954.217.769	98,29%	Rp 173.551.231	1,71%
		Belanja Barang	Rp 3.619.634.000	Rp 3.208.579.816	88,64%	Rp 411.054.184	11,36%
		Belanja Modal	Rp 1.832.380.000	Rp 1.706.619.000	93%	Rp 125.761.000	6,86%
		Total	Rp 15.579.783.000	Rp 14.869.416.585	95,40%	Rp 710.366.415	4,56%
14	Pengadilan Negeri Batam	Belanja Pegawai	Rp 8.934.826.000	Rp 8.872.512.250	99,30%	Rp 62.313.750	0,70%
		Belanja Barang	Rp 3.259.315.000	Rp 2.820.109.162	86,52%	Rp 439.205.838	13,48%
		Belanja Modal	Rp 605.000.000	Rp 603.024.073	99,67%	Rp 1.975.927	0,33%
		Total	Rp 12.799.141.000	Rp 12.295.645.485	96,07%	Rp 503.495.515	3,93%
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Belanja Pegawai	Rp 2.920.132.000	Rp 2.869.867.726	98,30%	Rp 50.264.274	1,72%
		Belanja Barang	Rp 1.816.814.000	Rp 1.748.781.811	96,30%	Rp 68.032.189	3,74%
		Belanja Modal	Rp 10.000.000	Rp 9.900.000	99,00%	Rp 100.000	1,00%

		Total	Rp 4.746.946.000	Rp 4.628.549.537	97,50%	Rp 118.396.463	2,49%
16	Pengadilan Negeri Ranai	Belanja Pegawai	Rp 3.932.843.000	Rp 3.729.085.795	94,82%	Rp 203.757.205	5,18%
		Belanja Barang	Rp 2.004.233.000	Rp 1.973.123.371	98,45%	Rp 31.109.629	1,55%
		Belanja Modal	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%	-	-
		Total	Rp 5.947.076.000	Rp 5.712.209.166	96,05%	Rp 234.866.834	4%

2. REALISASI DIPA 03

Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03

No	Satuan Kerja	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran	%
1	Pengadilan Tinggi Riau	Belanja Barang	Rp428.790.000	Rp428.180.094	99,86%	Rp 609.906	0,14%
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Belanja Barang	Rp 541.600.000	Rp 527.811.887	97,45%	Rp13.788.113	2,55%
3	Pengadilan Negeri Dumai	Belanja Barang	Rp 220.730.000	Rp 219.745.350	99,60%	Rp 984.650	0,40%
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Belanja Barang	Rp 187.864.000	Rp 187.232.500	99,70%	Rp 631.500	0,30%
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Belanja Barang	Rp 540.858.000	Rp 531.480.500	98,27	Rp 9.377.500	1,70%
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Belanja Barang	Rp 195.939.000	Rp 195.351.952	99,70%	Rp 587.048	0,30%
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Belanja Barang	Rp 194.245.000	Rp 193.149.620	99,44	Rp 1.095.380	0,60%
8	Pengadilan Negeri Rengat	Belanja Barang	Rp 138.873.000	Rp 133.702.345	96,30%	Rp 5.170.665	3,70%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Belanja Barang	Rp 96.635.000	Rp 91.329.675	95,50%	Rp 4.305.325	4,50%
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Belanja Barang	Rp 150.853.000	Rp 148.185.210	98,20%	Rp 2.667.790	1,80%
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Belanja Barang	Rp 132.883.000	Rp 131.912.706	99,27%	Rp 970.294	0,73%
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Belanja Barang	Rp 205.965.000	Rp 204.413.800	99,25 %	Rp 1.551.200	0,80%
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Belanja Barang	Rp 592.610.000	Rp 529.654.744	89,38%	Rp62.955.256	10,60%
14	Pengadilan Negeri Batam	Belanja Barang	Rp 430.048.000	Rp 408.410.786	94,97	Rp21.637.214	5,03%
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Belanja Barang	Rp 120.952.000	Rp 113.137.930	93,54%	Rp 7.814.070	6,50%
16	Pengadilan Negeri Ranai	Belanja Barang	Rp 87.828.000	Rp 87.004.764	99,06%	Rp 823	0,94%

3. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Berikut rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi

Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 30. Realisasi PNBP Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Kode Akun					
		425131	425231	425232	425233	425239	425911
1	Pengadilan Tinggi Riau	Rp 27.071.343	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.460.000	Rp -
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Rp 12.942.935	Rp200.000	Rp 5.420.000	Rp 31.800.000	Rp566.340.567	Rp -
3	Pengadilan Negeri Dumai	Rp 12.349.778	Rp -	Rp 1.070.000	Rp 5.465.000	Rp 13.726.500	Rp 451
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Rp 13.253.600	Rp 10.000	Rp 2.270.000	Rp 7.445.000	Rp 30.989.200	Rp -
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Rp 26.726.238	Rp -	Rp 1.940.000	Rp 6.240.000	Rp 20.492.500	Rp -
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Rp 23.738.907	Rp -	Rp 2.140.000	Rp 6.870.000	Rp 23.705.500	Rp -
8	Pengadilan Negeri Rengat	Rp 5.668.907	Rp -	Rp 1.730.000	Rp 3.490.000	Rp 12.310.500	Rp -
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Rp 19.424.830	Rp -	Rp -	Rp 8.375.000	Rp 14.033.000	Rp -
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Rp 10.348.000	Rp -	Rp 840.000	Rp 2.980.000	Rp 6.635.780	Rp348.500
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Rp 13.067.288	Rp 70.000	Rp 1.240.000	Rp 6.615.000	Rp 17.541.000	Rp -
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Rp -	Rp -	Rp 650	Rp. 2.290,000	Rp. 8.536,000	Rp -
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Rp 22.908.497	Rp -	Rp -	Rp 9.295.000	Rp 31.239.000	Rp -
14	Pengadilan Negeri Batam	Rp 41.756.076	Rp -	Rp 8.130.000	Rp 42.030.000	Rp 87.723.000	Rp -
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Rp 4.500.000	Rp -	Rp -	Rp 5.160.000	Rp 17.418.000	Rp -
16	Pengadilan Negeri Ranai	Rp -	Rp -	Rp 260	Rp 780	Rp 3.271.500	Rp -
	Jumlah	Rp206.685.056	Rp 280.000	Rp24.780.910	Rp135.765.780	Rp845.426.047	Rp348.951

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2022 meliputi tanah dan

bangunan, Kendaraan Dinas, mesin non TIK, mesin non TIK , Mesin TIK dan Prasarana Lainnya.

1. TANAH

Dalam upaya terus mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN. Pengadilan Tinggi Maupun Pengadilan Negeri terus melakukan inventarisasi legalitas Kepemilikan seluruh BMN. Khususnya sertifikat tanah. Hla ini disebabkan kompleksitas masalah tanah

yang menurut ketentuan peraturan perundang – rundangan harus berstatus milik pemerintah Republik Indonesia. Berikut rincian progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2022 pada Pengadilan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau.

Tabel 31. Daftar Tanah

No	Satuan Kerja	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Total
1	Pengadilan Tinggi Riau	6	0	6
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	9	0	9
3	Pengadilan Negeri Dumai	9	0	9
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	4	0	4
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	10	0	10
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	2	0	2
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	2	0	2
8	Pengadilan Negeri Rengat	6	3	9
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	2	1	3
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	7	0	7
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	2	1	3
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2	0	2
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	11	0	11
14	Pengadilan Negeri Batam	5	-	5
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	3	0	3
16	Pengadilan Negeri Ranai	1	0	1

2. TANAH & GEDUNG

Penetapan Status Penggunaan BMN adalah suatu bentuk surat keputusan dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab Satuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan administrasi yang

melekat pada materiil BMN itu sendiri sehingga harus dimiliki oleh setiap BMN yang sesuai ketentuan untuk menghindari duplikasi, kehilangan arsip data serta terjaminnya kepastian hukum BMN itu sendiri. Berikut rincian tanah dan gedung Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah sudah/belum PSP tahun 2022.

Tabel 32. Daftar PSP Tanah & Gedung

No	Satuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Pengadilan Tinggi Riau	Tanah	21.795	55.640.370.000	10.000	40.000.000
		Bangunan	1.420	12.679.798.020		
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Tanah Kantor Jl Teratai No. 85	2.854	9.700.327.000		
		Tanah Kantor Jl Dt. Setia Maharaja	9.939	18.096.921.800		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.157	5.506.592.000		
		Bangunan Rumah Negara	1.080	1.759.745.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara	4.632	12.289.994.000		
3	Pengadilan Negeri Dumai	Tanah	11.220	27.364.775.000	0	-
		Bangunan	2.203	1.649.303.920	0	
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4.197	2.492.546.000		
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.280	5.651.597.000		

		Bangunan Gedung Kantor Permanen			970	Rp2.198.154.000
		Bangunan Rumah Negara Golongan I Type C			770	Rp1.625.616.000
5	Pengadilan Negeri Bengkulu	Tanah Kantor Utama	4.490	7.426.460.000		
		Tanah Zitting Plaatz SLP	766	1.250.457.000		
		Tanah Zitting Plaatz Duri	1.037	1.021.445.000		
		Tanah Rumah Negara	-	-		
		Bangunan Kantor UTAMA	940	.359.000.000		
		Bangunan Zitting Plaats SLP	150	278.878.000		
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Tanah Gedung Kantor Permanen	15.820	34.804.000		
		Tanah Gedung Semi Permanen (Zetting Plat)	731	105.995.000		
		Bangunan Gedung Permanen	1,538	4.061.479.300		
		Bangunan Gedung Semi Permanen (Zetting Plat)	173	186.850.000		
		Bangunan Rumah Negara	590	2.103.960.000		
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Tanah Kantor			9650	Rp 2,764,725,000
		Tanah Rumah Negara			5000	Rp 1,018,625,000
		Bangunan Kantor			1538	Rp 4,561,092,770
		Bangunan Rumah Negara			730	Rp 1,911,450,013
		Bangunan			170	Rp 241,946,964
8	Pengadilan Negeri Rengat	Tanah	5.358	Rp 9.158.358.000		
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	7.250	Rp 1.286.377.000		
		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	6.728	Rp 11.639.612.000		
		Bangunan Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.400	Rp 5.057.113.237		
		Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	36	Rp 87.472.000		
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Tanah	32.688 M2	Rp 8,846,710,000	9.879 M2	Rp 1,710,870,000
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Rp 17,435,719,912		
		bangunan Rumah Negera Golongan I Tipe Bpermanen	9	Rp 1,890,182,000		
		jalan dan jembatan		Rp -	1	Rp 198,937,000
		Bangunan Gedung Tempat ibadah permanen	2	Rp 426,527,000		
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Tanah	4.892	4,444,007,200		
		Bangunan	779	2,237,328,897		
		Tanah Rumah Negara	2.593	3,834,564,000		
		Bangunan Rumah Negara	570	675,860,716		
		Bangunan				
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	18.716	673.772.526		
		Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.172	726.347.000		
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6.762	270.479.714		
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Tanah	1.001	958.576.000		
		Bangunan	195	371,126,000	2.496	23.745.542.723
		Tanah			10.000	1.930/370.000
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.791	2.862.205.000	-	-
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	845	670.930.000	-	-

		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.871	3.593.044.000	-	-
		Tanah Gedung Zitting Platz	1.011	144.573.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	-	1.824	1.479.264.000
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	481	235.690.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	595	291.550.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	600	330.600.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	600	330.600.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	705	388.455.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0	-	1.457	1.008.244.000
14	Pengadilan Negeri Batam	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.959	5.355.720.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	400	186.000.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.000	880.000.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	756	447.840.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.964	900.000.000	-	-
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Tanah	8.555	2.135.469.200		
		Bangunan	4.080	6.327.374.945		
16	Pengadilan Negeri Ranai	Tanah	20.000	2.660.000.000		
		Bangunan	2.160	16,171,906,683,00		

3. KENDARAAN DINAS

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) kendaraan Dinas pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan

Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah sudah/belum PSP tahun 2022

Tabel 33. Daftar PSP Kendaraan dinas

No	Satuan Kerja	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tinggi Riau	Kendaraan Roda 4	5	5	-
		Kendaraan Roda 2	7	7	-
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Kendaraan Roda 4	6	6	-
		Kendaraan Roda 2	13	13	-
3	Pengadilan Negeri Dumai	Kendaraan Roda 4	1	1	-
		Kendaraan Roda 2	8	8	-
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	Kendaraan Roda 4	8	8	-
		Kendaraan Roda 2	2	2	-
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	Kendaraan Roda 4	10	10	-
		Kendaraan Roda 2	3	3	-
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Kendaraan Roda 4	-	-	-

		Kendaraan Roda 2	-	-	-
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	Kendaraan Roda 4	2	0	2
		Kendaraan Roda 2	6	0	6
8	Pengadilan Negeri Rengat	Kendaraan Roda 4	3	3	-
		Kendaraan Roda 2	8	8	-
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Kendaraan Roda 4	2	2	-
		Kendaraan Roda 2	9	9	-
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	Kendaraan Roda 4	4	4	-
		Kendaraan Roda 2	5	5	-
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Kendaraan Roda 4	2	2	-
		Kendaraan Roda 2	11	11	-
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Kendaraan Roda 4	1	1	-
		Kendaraan Roda 2	3	3	-
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Kendaraan Roda 4	3	3	-
		Kendaraan Roda 2	9	9	-
14	Pengadilan Negeri Batam	Kendaraan Roda 4	7	4	3
		Kendaraan Roda 2	8	8	-
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Kendaraan Roda 4	4	4	-
		Kendaraan Roda 2	8	8	-
16	Pengadilan Negeri Ranai	Kendaraan Roda 4	4	4	-
		Kendaraan Roda 2	6	6	-

4. MESIN NON TIK

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) Mesin Non TIK pada

pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 34. Daftar PSP Mesin Non TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah (unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tinggi Riau	917	875	42
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	1342	1309	33
3	Pengadilan Negeri Dumai	412	412	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	274	274	92
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	709	709	-
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	636	231	132
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	912	891	21
8	Pengadilan Negeri Rengat	506	405	101
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	754	559	195
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	506	392	114
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	637	507	130
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	456	69	387
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	964	817	147

14	Pengadilan Negeri Batam	1014	978	66
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	424	424	0
16	Pengadilan Negeri Ranai	915	590	25

5. MESIN TIK

Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) Mesin Non TIK pada

Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022.

Tabel 35. Daftar PSP Mesin TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah (unit)	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tinggi Riau	190	155	35
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	264	254	10
3	Pengadilan Negeri Dumai	110	110	0
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	78	68	15
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	73	73	0
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	104	34	70
7	Pengadilan Negeri Pelalawan	94	891	21
8	Pengadilan Negeri Rengat	98	38	60
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	124	82	42
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	145	103	42
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	148	93	55
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	51	20	31
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	131	127	4
14	Pengadilan Negeri Batam	117	81	36
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	98	88	10
16	Pengadilan Negeri Ranai	55	30	25

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT

Ecourt adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Pada tahun 2022, Pengadilan

Tinggi Riau dan 15 (lima belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau seluruhnya telah menerapkan E-Court. Rincian jumlah perkara pada Pengadilan negeri yang didaftarkan melalui ecourt, dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 36. Implementasi E-Court Tahun 2022












No	Satuan Kerja	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan
1	Pengadilan Tinggi Riau	71	71	71	-	-	-
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	737	724	326	57	10	331
3	Pengadilan Negeri Dumai	76	76	74	0	2	67
4	Pengadilan Negeri Bangkinang	147	147	87	17	9	34
5	Pengadilan Negeri Bengkalis	187	187	53	10	4	120
6	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	120	120	59	8	1	52

7	Pengadilan Negeri Pelalawan	181	181	41	19	2	119
8	Pengadilan Negeri Rengat	90	90	31	16	-	43
9	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	266	266	79	14	0	173
10	Pengadilan Negeri Tembilahan	89	89	21	15	0	53
11	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	185	185	77	5	0	102
12	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	57	57	37	7	0	13
13	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	187	186	80	6	0	100
14	Pengadilan Negeri Batam	1151	1151	448	56	12	635
15	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	149	149	51	8	2	88
16	Pengadilan Negeri Ranai	25	25	6	0	0	19

2. IMPLEMENTASI SIPP

Seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau telah mengimplementasikan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 5.1.0

Penilaian implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau pada Tahun 2022 dijelaskan pada Gambar dibawah ini.

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501~1000	II	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri	148.35	549.20	101.98	187.56	 987.09
2	501~1000	IB	Pengadilan Negeri Pelalawan	148.59	545.70	101.66	187.46	 983.41
3	1001~2000	II	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	151.89	540.39	101.96	187.38	 981.62
4	501~1000	IB	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	146.08	542.80	101.66	187.56	 978.10
5	1~500	II	Pengadilan Negeri Tembilahan	140.75	541.49	102.00	187.42	 971.66
6	1001~2000	IB	Pengadilan Negeri Bengkalis	143.94	538.38	101.99	187.20	 971.51
7	501~1000	IB	Pengadilan Negeri Bangkinang	145.99	536.34	101.95	185.15	 969.43
8	>2000	IA	Pengadilan Negeri Pekanbaru	149.58	527.36	120.44	168.99	 966.37
9	1~500	II	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	150.67	533.09	93.27	187.37	 964.40
10	501~1000	II	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	145.26	529.00	101.97	187.14	 963.37
11	501~1000	IA	Pengadilan Negeri Dumai	150.43	529.69	108.91	169.80	 958.83
12	1~500	II	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	139.15	537.13	93.17	184.99	 954.44
13	501~1000	IA	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	150.67	523.80	109.00	166.40	 949.87
14	1~500	II	Pengadilan Negeri Ranai	149.51	528.20	86.00	181.80	 945.51
15	>2000	IA	Pengadilan Negeri Batam	149.61	499.24	108.76	169.48	 927.09



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

BAB III

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Riau dan satker dibawahnya melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi badan peradilan yang Agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

1) Kepemimpinan (*leadership*);

2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*);

3) Fokus Pelanggan (*customer focus*);

4) Sistem Dokumentasi (*document system*);

5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*);

6) Manajemen Proses (*process management*); dan

7) Hasil Kinerja (*performance results*).

Pada tahun 2022, seluruh Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau telah diakreditasi dan disurveillance dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

Satuan Kerja	Tipe/Kelas	Nilai Akreditasi / Surveillance	Tanggal Sertifikat Akreditasi/ Surveillance	Keterangan
Pengadilan Tinggi Riau	Type B	730	9 Desember 2022	A (Excellent)
Pengadilan Negeri Pekanbaru	Kelas IA	720	31 Oktober 2016/ Akreditasi A	1. A (Excellent)
		710	15 Januari 2018/ Surveillance ke - I	2. A (Excellent)
		710	18 September 2019/ Surveillance ke - II	3. A (Excellent)
		715	06 Januari 2021/ Surveillance ke - III	4. A (Excellent)
		711	06 Januari 2022/ Surveillance ke - IV	5. A (Excellent)
Pengadilan Negeri Dumai	Kelas IA	734	09 Desember 2022/ Surveillance ke - V	6. A (Excellent)
		700	06 Januari 2022	1. A (Excellent)
Pengadilan Negeri Bangkinang	Kelas IB	700	06 Januari 2021	2. A (Excellent)
		670	Wednesday, July 05, 2017	Akreditasi Pertama Nilai B
		713	Monday, September 03, 2018	Surveillance ke - 1 : A Excellent
		715	Thursday, September 19, 2019	Surveillance ke - 2 : A Excellent
		721	Thursday, March 31, 2022	Surveillance ke - 3 : A Excellent
		722	Monday, April 04, 2022	Surveillance ke - 4 : A Excellent
729	Friday, November 11, 2022	Surveillance ke - 5 : A Excellent		

Pengadilan Negeri Bengkalis	Kelas IB	719	Monday, April 04, 2022	A
Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Kelas IB	720	Monday, April 04, 2022	A
Pengadilan Negeri Pelalawan	Kelas IB	707	19 Juli 2017	Akreditasi Pertama Nilai A (Excellent)
		709		Surveillance ke - 1 : A Excellent
		716	29 Januari 2020	Surveillance ke - 2 : A Excellent
		720	10 Maret 2021	Surveillance ke - 3 : A Excellent
		720	4 April 2022	Surveillance ke - 4 : A Excellent
Pengadilan Negeri Rengat	Kelas II	710	Monday, April 04, 2022	A
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Kelas II	710	04 APRIL 2022	A
Pengadilan Negeri Tembilahan	Kelas II	710	04 APRIL 2022	A
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	Kelas II	702	Monday, April 04, 2022	A
		708		A
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	Kelas II	705	04 APRIL 2022	A
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Kelas IA	715	6 Januari 2022	A
Pengadilan Negeri Batam	Kelas IA	719	6 Januari 2022	A
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	Kelas II	714	Friday, November 11, 2022	A
Pengadilan Negeri Ranai	Kelas II	715	Monday, April 04, 2022	A

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Seluruh satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai SK Dirjen Badilum No.77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 beserta perubahannya No.3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Riau dan beberapa satker dibawahnya memperoleh penghargaan dalam kategori

terbaik terfavorit dalam penilaian lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum. Hasil penilaian tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2474/DJU/SK/HM 02.3/12/2022 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 38. Hasil Penilaian Lomba PTSP Dirjen Badilum

No	Satuan Kerja	Peringkat	Kategori
1	Pengadilan Tinggi Riau	Juara Harapan I	PTSP Pengadilan Tingkat Banding
2	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Juara III	PTSP Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	Juara III	PTSP Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk mewujudkan Kinerja Peradilan yang Prima, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri secara berkesinambungan terus melakukan pembenahan dan inovasi terhadap segala jenis layanan baik dari segi teknologi

informasi dan sarana prasarana yang nantinya akan menunjang kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di lingkungan Peradilan. Berikut inovasi pelayanan publik yang ada di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

Tabel 39. Inovasi Pengadilan sewilayah hukum PT Riau

No	Nama Satker	Jumlah Inovasi	Inovasi
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	13	Aplikasi Antrian Panggilan Sidang, Aplikasi QR-Code Putusan, Aplikasi e-Monev dan Pelaporan Akreditasi Penjaminan Mutu, Aplikasi Antrian Pengunjung PTSP, Aplikasi Kasir, Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SIMLAPEG), Aplikasi DUK PN Riau, Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi, QR-Code Layanan PTSP, Aplikasi Penilaian Personal, Aplikasi Survei Disabilitas, Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (APATUK), Aplikasi Salinan putusan Online
2	Pengadilan Negeri Dumai	11	Aplikasi Reminder SIPP, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Si-Restu, Aplikasi Simontawai, JDIH PN Dumai, Aplikasi Alakum, Aplikasi Akci Persada, Aplikasi CAKEP (Cakap Eksekusi), Pendaftaran Antrian Prioritas, SMAP Corner
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	12	Aplikasi Antrian PTSP Secara Elektronik, Aplikasi Mext SIPP (Monitoring Eksternal SIPP), VIRAL (Virtual Layanan Asisten PN Bangkinang), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Aplikasi Antrian Persidangan, Aplikasi Strong ZI, E-Brosur, Aplikasi PTSP Online, Aplikasi Prosidang, Personalitas, Superdata, Lampu Maratun
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	6	Simolek (Sistem Informasi Monitoring Elektronik), PN Bengkalis Info, Virtual PTSP, Aplikasi E-Zit (Elektronik Surat Izin dan Cuti), E - Brosur, Aplikasi Antrian Sidang PN Bengkalis
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	4	Aplikasi Info Perkara dan denda tilang online, Virtual Assistance Berbasis WA Boot, Layanan Antar Gratis ke Jalan Lintas Ojek Si-Anjas (Siap Antar ke jalan Lintas), Aplikasi Simonjah (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja honorer)
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	4	ALADIN (Aplikasi Layanan Informasi Pengadilan), ESAKU (Elektronik Surat Keterangan), Aplikasi Audio Pemanggilan Persidangan, E-Brosur
7	Pengadilan Negeri Rengat	6	SILAPANDU (Sistem Informasi Pelayanan Pengadilan Terpadu), E-QPTSP, E-FORIZATOR, E-FORMULIR, VISIAN - SARAT, OPTIMALISASI AKSES INFORMASI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI RENGAT

8	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	4	PTSP ONLINE, SEPUTARAN, Brosur Braile, Kartu Prioritas
9	Pengadilan Negeri Tembilahan	3	SICEPATAN (Sistem Informasi Pelayanan Cepat Tanggap), OWMAS (Online Waarmerking Service), OIBUK (Online Izin Besuk)
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	3	Virtual Assistant, E-ISTANA, OPASUS (Online Pengambilan Salinan Putusan)
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	9	SIJAMU (Sistem Informasi Jaminan Mutu), Aplikasi Kepuasan Masyarakat Pelayanan PN Teluk Kuantan, e-SUKET (Surat Keterangan Online), Sistem Informasi KIOSK, e-Brosur, kartu Prioritas bagi Disabilitas, Tanda Kursi Ruang Tunggu Prioritas Khusus bagi Penyandang Disabilitas, Video Alur Persidangan Perkara Perdata Gugatan Non E-litigasi dan Video ALur Pelayanan Pengguna Layanan Prioritas di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, e-Brosur dengan fitur Audio di Website PN Teluk Kuantan
12	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	5	SIPP Berbasis Android, Layanan Virtual Asisten Pegadilan (Lavadiil), Antrian Sidang, PTSP Online, E-Brosur (Audio Visual)
13	Pengadilan Negeri Batam	4	MONALISA (Monitoring dan Analisa Pimpinan Pengadilan), SI PERI, ASTRID, SILA (Sistem Informasi Layanan)
14	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	6	e-Brosur, Antrian PTSP, E-Lakse (Elektronik Layanan Kesekretariatan), SIBETA (Sistem Informasi Besuk Tahanan), Audio Gratifikasi, Sistem Layanan Informasi Translator Dan Ramah Disabilitas
15	Pengadilan Negeri Ranai	1	E-Brosur



PENGADILAN TINGGI RIAU

BAB VI PENGAWASAN

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Riau adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang

bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau meliputi Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau, Pengawasan Pembinaan Bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Riau, dan menindaklanjuti pengaduan

1. PENGAWASAN DAERAH

Untuk melaksanakan pengawasan pada Pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor : W4-U/4987/KP.04.5/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah:

1. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya baik teknis maupun administrasi peradilan, untuk mengecek tindaklanjutnya.
2. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan pemeriksaan dokumen. laporan daerah pembinaan dan pengawasan.
3. Menganalisa temuan-temuan

dimaksud dan menyampaikan laporan Pengadilan Tinggi Riau sekali beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan

Adapun hasil pengawasan daerah pada tahun 2022 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya administrasi dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis maupun kesekretariatan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap satuan kerja sehingga banyak formasi jabatan yang kosong.
3. Kendala lain adalah kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak perlu pembaruan dan pengadaan

Rincian Pengawasan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dijelaskan pada dibawah ini

Tabel 40. Pengawasan daerah Tahun 2022

No	Nama Kegiatan Pengawasan	Subjek Pengawasan	Objek Yang Diawasi	Waktu	Tempat	Kesimpulan
1	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Tanjung Balai Karimun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	24 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022	PN Tanjung Balai Karimun	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
2	Pembinaan, Pengawasan dan Surveilans	PN Batam	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	24 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022	PN Batam	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
3	Pembinaan, Pengawasan dan Surveilans	PN Tanjungpinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	24 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022	PN Tanjungpinang	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
4	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Bangkinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	25 s/d 26 April 2022	PN Bangkinang	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
5	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Pasir Pengaraian	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	26 s/d 27 April 2022	PN Pasir Pengaraian	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
6	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Teluk Kuantan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	28 s/d 29 April 2022	PN Teluk Kuantan	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
7	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Rokan Hilir	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	19 s.d 20 Mei 2022	PN Rokan Hilir	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
8	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Rengat	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	19 s.d 20 Mei 2022	PN Rengat	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
9	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Dumai	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	17 s.d 18 Mei 2022	PN Dumai	Temuan Pemeriksaan sebelumnya sudah ditindak lanjuti, namun ada temuan - temuan baru terkait tupoksi yang perlu diperbaiki
10	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Siak Sri Indrapura	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	17 s.d 18 Mei 2022	PN Siak Sri Indrapura	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
11	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Bengkalis	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	23 s.d 24 Mei 2022	PN Bengkalis	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan

12	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Tembilahan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	17 s.d 19 Mei 2022	PN Tembilahan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
13	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Pelalawan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	17 s.d 19 Mei 2022	PN Pelalawan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
14	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans	PN Pekanbaru	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	2 s.d 3 Juni 2022	PN Pekanbaru	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
15	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans secara daring	PN Tanjungpinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	6 Juli 2022	PN Tanjungpinang	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
16	Pembinaan Pengawasan, dan Surveilans secara daring	PN Ranai	PN Ranai	6 Juli 2022	PN Ranai	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
17	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Batam	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	5 Juli 2022	PN Batam	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
18	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Tanjung Balai Karimun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	26 s.d 28 Oktober 2022	PN Tanjung Balai Karimun	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
19	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Ranai	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	23 s.d 26 Oktober 2022	PN Ranai	Temuan Pemeriksaan sebelumnya sudah ditindak lanjuti, namun ada temuan - temuan baru terkait tupoksi yang perlu diperbaiki
20	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Bangkinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	27 s.d 28 Oktober 2022	PN Bangkinang	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
21	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Bengkalis	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	31 Oktober 2022 s.d 2 November 2022	PN Bengkalis	Temuan Pemeriksaan sebelumnya sudah ditindak lanjuti, namun ada temuan - temuan baru terkait tupoksi yang perlu diperbaiki
22	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan Pendampingan ZI	PN Pasir Pengaraian	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	24 s.d 26 Oktober 2022	PN Pasir Pengaraian	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
23	Pembinaan Pengawasan, Surveilans dan	PN Rengat	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	24 s.d 26 Oktober 2022	PN Rengat	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan

	Pendampingan ZI					(minor) yang perlu diperbaiki
24	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Tembilahan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	19 s/d 21 Oktober 2022	PN Tembilahan	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
25	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Teluk Kuantan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	24 s/d 26 Oktober 2022	PN Teluk Kuantan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
26	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Rokan Hilir	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	19 s/d 21 Oktober 2022	PN Rokan Hilir	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
27	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Siak Sri Indrapura	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	20 s/d 21 Oktober 2022	PN Siak Sri Indrapura	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
28	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Pelalawan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	17 s/d 18 Oktober 2022	PN Pelalawan	Secara umum sudah baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan
29	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Dumai	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	17 s/d 18 Oktober 2022	PN Dumai	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
30	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Tanjungpinang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	27 s.d 29 November 2022	PN Tanjungpinang	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki
31	Pembinaan Pengawasan, Surveil dan Pendampingan ZI	PN Batam	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	29 s.d 30 November 2022	PN Batam	Tupoksi sudah berjalan baik, namun masih ada temuan - temuan (minor) yang perlu diperbaiki

2. PENGAWASAN BIDANG

Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: W4.U/5176/KP.04.5/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang

1. Bidang Teknis

- Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara banding, di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau
- Memantau & memeriksa

Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas/Pembinaan Bidang-Bidang Pengadilan Tinggi Riau. Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah :

- pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara banding
- Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara

- banding
- Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding
 - Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara banding
 - Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding
 - Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara
 - Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

2. Bidang Kesekretariatan

- Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Tinggi Riau tahun 2020 secara umum sebagai berikut :

- Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku Pola Bindalmin, namun masih terdapat

kurang ketelitian dalam melaksanakan tugas.

- Penerapan hukum acara dalam putusan PT Pekanbaru secara substansi sudah baik.
- Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik
- Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
- Penyusunan surat-surat yang terdapat pada Bundel B dan dalam berkas perkara tingkat banding secara umum telah terlaksana dengan baik.
- Penyelesaian minutası berkas-berkas perkara banding, baik di Bagian Kepaniteraan Pidana, Perdata maupun di Kepaniteraan Hukum telah berjalan baik.
- Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Riau sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan professional.
- Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai peraturan
- Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik
- Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik
- Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi
- Pengembangan Teknologi & Informasi pada Pengadilan Tinggi Riau sudah berjalan baik

3. PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Riau Pada Tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) pengaduan dan sudah

ditindaklanjuti dengan penanganan pengaduan tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 41. Penanganan Pengaduan

No	Asal surat	Pelapor	Terlapor	Perihal pengaduan	Keterangan
1.	Jefri	Jefri	PN Bengkal	Permohonan Kepastian Hukum Jefri als Jef als Jef Sparo als to Bin Mastur bahwa pelapor mau mau melakukan upaya hukum PK namun bundel A putusan tersebut tidak ditemukan sehingga prosesk PK pelapor tertunda sampai saat ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dimintakan klarifikasi ke PN Bengkal dengan surat nomor W4.U/328/HK.00.5/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 2. Telah diterima Klarifikasi dari PN Bengkal dengan surat nomor W4.U3/287/HN.01.10/1/2022/PN Bls 3. Sudah selesai ditindaklanjuti
2.	Zulkhairi, SH., MH	Zulkhairi, SH., MH	Ketua/Hakim PN Pelalawan	Laporan/Pengaduan dalam Perkara Perdata Keberatan Gugatan Sederhana dengan Register Nomor 14/PDT.GS/2021/PN PLW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta klarifikasi kepada Hakim dan Jurusita yang menangani perkara nomor : 14/PDT.GS/2021/PN PLW dengan surat tanggal 7 Februari 2022 dengan nomor W4.U/833/HK.00.5/2/2022 2. Sudah selesai ditindaklanjuti
3.	MARI	Nasib Siahaan, SH	Hakim PN Batam atas nama Lia Herawati, SH., MH	Pelanggaran penerapan hukum acara, sikap serta hakim yang dilakukan oleh Lia Herawati, SH., MH dalam menjalankan jalannya sidang dalam perkara praperadilan No. 13/Pid.Pra/2021/PN. Btm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk SK Tim Pemeriksaan dengan Nomor : W4.U/2353/PS.05/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 2. Pengaduan dari pelapor dicabut dengan surat tanggal 10 Juni 2022 No. 044/KANSR/VII/2022 dan Laporan ditutup.
4.	Zulkhairi, SH., MH	Zulkhairi, SH., MH	Joko Ciptanto, SH	Pengaduan / laporan bahwa Hakim PN Pelalawan an. Joko Ciptanto, SH dalam siding perkara gugatan sederhana No. 10/pdt.G..S/2022/PN Plw tgl 10 Mei 2022 sudah menampilkan berat sebelah menggiring tergugat untuk mengkebiri tergugat baik salam pemeriksaan saksi tergugat maupun pembuktian seperti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk SK Tim Pemeriksa dengan Nomor : W4.U/2501/PS.05/5/2022 tanggal 13 Mei 2022 2. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap pelapor, terlapor, pihak terkait I, terkait II di

				bertemu dengan tergugat tanpa penggugat lau meminta tergugat untuk menyampaikan bukti dan saksi melalui terror dari intimidasi ke keluarga penggugat yang ditentukan oleh Hakim Joko Ciptanto, SH kepada tergugat yang berasal dari pemerintah daerah diduga kuat karena ada setoran rutin ke PN Plw cq salah satunya ke Hakim Joko Ciptanto, SH	hubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilaporkan oleh pihak pelapor tersebut tidak terbukti
5.	Fatdjeri Razi, SE, MBA	Fatdjeri Razi, SE, MBA	Sdr. Halimatussakdi h, SH (Hakim PN Batam) dan Sdr. Bacok (Panitera Pengganti PN Batam)	Laporan pengaduan dan permohonan keadilan kepada KPT Pbr atas perilaku dan putusan Ketua Majelis Hakim PN Batam Sdr. Halimatussakdi h dan Panitera Pengganti Sdr. Bacok atas perkara No. 324/Pdt.g/2021/PN Btm tgl 19 Oktober 2021	3. Pengaduan ditutup
6.	Zailani	Zailani	Mery Donna Tiur Pasaribu, SH., MH	Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Oleh Hakim / Majelis Hakim dalam Perkara No. 47/Pid.C/2022/PN Dum	1. Membentuk SK Tim Pemeriksa dengan Nomor : W4.U/2517/PS.05/5/2022 Tanggal 16 Mei 2022 2. Bahwa terlapor tidak terinduksi melakukan pelanggaran UU dan Kode Etik Hakim dan PP (Panitera Pengganti) 3. Pengaduan Ditutup
7.	Putra AW / Advokat	Putra AW / Advokat	KPN, Majelis Hakim dan Panitera Penganti dalam perkara Nomor : 174/PDT.G/2021/PN PBR dan Nomor 39/PDT.G/2022/P N PBR	Terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan panitera karena ketidak beresan dalam penanganan perkara oleh KPN Pekanbaru, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	1. Membuat surat keputusan keputusan Pengadilan Tinggi Riau untuk dilakukan pemeriksaan / klarifikasi kepada pelapor dan terlapor dengan surat nomor : W4.U/3867/PS.05/8/2022 tanggal 9 Agustus 2022 2. Mengirim LHP ke Bawas dengan Nomor : W4.U/5496/HK.00.5/11/2022 tanggal

					10 November 2022
8.	Law Firm Smart man (Dr. Saut Marulitua Manik, SHL., SH., M.H., CLA)	Dr. Saut Marulitua Manik, SHL., SH., M.H., CLA	Majelis Perkarat No. 39/Pdt.G/2021/P N Rhl	Permohonan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Atas Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Terhadap Gugatan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Dengan Reg. Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN Rhl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan tidak ditindaklanjuti karena PN Rohil sudah benar melanjutkan pemeriksaan perkara No. 39/Pdt.G/2021/PN Rhl dengan dasar putusan sela No. 39/Pdt.g/2021/PN Rhl yang pada pokoknya PN Rohil berwenang memeriksa perkara tersebut dan menyatakan melanjutkan pemeriksaan pokok 2. Surat dikirim ke Pelapor dengan nomor : W4.U/4580/PS.00.5/9/2022 tanggal 19 September 2022 3. Sudah selesai ditindaklanjuti
9.	Zulkhairi, S.H., M.H.	Fadriyadi Kudri, S.H., LL.M, dkk (Kuasa tergugat 3 PT Gunung Mas Raya)	Majelis Hakim PN Rohil Perkarat Nomor : 44/Pdt.G/2021/P N Rhl	Keberatan atas Atas Pemeriksaan Setempat Tambahan Dalam Perkarat Perdata No. 44/Pdt.G/2021/PN.JKT.RH L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan ini tidak ditindaklanjuti karena pada dasarnya PN Rohil sudah benar 2. Surat dikirim ke Pelapor dengan nomor : W4-U/4579/PS.05/9/2022 tanggal 19 September 2022 3. Sudah selesai ditindaklanjuti
10.	LT & Associates Low Office (Linda Theresia, S.H)	Linda Theresia, SH	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun - Panitera 	Keberatan atas Konstatering tgl 20 September 2022 (Pengaduan Masyarakat No. 17/Pdt.G/2013/PN Tbk)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan ditelaah oleh Hakim Tinggi : <ol style="list-style-type: none"> a. Bpk Aswijon, S.H., M.H b. Ibu Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H 2. Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi tersebut tidak ada aturan yang dilanggar.

					3. Tidak ditindaklanjuti
11.	Panitera MARI	Agusra Yendri	- Ketua Pengadilan Negeri Batam - Panitera	Pengaduan atas penyalahgunaan wewenang/jabatan oleh Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Batam	Masih dalam proses telaah Hakim Tinggi PT Riau
12.	BAWAS MARI	Ernita Padang	Majelis Perkara Perdata No. 219/Pdt/G/2022/PN Btm	Adanya indikasi perilaku Hakim yang tidak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta jadwal siding yang tidak tepat waktu	Berkas Pengaduan dikembalikan dengan alasan PT Riau mengirim surat ke BAWAS MARI tgl 7 Desember 2022 Nomor : W4.U/5849/HK.00.5/12/2022 Perihal : PT Riau tidak dapat melanjutkan pemeriksaan / pemanggilan Pelapor dan Terlapor karena tanggal 5 Desember 2022 PT Kepri telah diresmikan dan telah beroperasi
13.	Zulkhairi, S.H., M.H.	Zulkhairi, S.H., M.H.	Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn	Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Perkara Peedata No. 16/Pdt.G.S/2022/PN Plw tertanggal 3 November 2022	1. Ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan/klarifikasi ke PN ybs dengan surat tanggal 20 Desember 2022 dengan No. W4.U/6164/HK.00.8/12/2022 2. Proses telaah
14.	Advokat/PH Askar Bone, S.H., MH	Aksar Bone, S.H., M.H.	KPN Pelalawan	Laporan/Pengaduan dimana KPN Pelalawan sangat terkesan memaksakan untuk melakukan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 27/Pdt.G/2019/PN PLW tertanggal 26 Agustus 2020 yang hanya bersifat Deklaratoir dan sangat kabur/tidak jelas	1. Ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan / klarifikasi ke PN ybs dengan surat tanggal 20 Desember 2022 nomor : W4.U/6165/HK.00.8/12/2022 2. Proses telaah oleh: a. Bapak Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H b. Bapak Admiral. S.H., M.H c. Ibu Sri Endang Amperawati

					Ningsih, S.H., M.H	
15.	Nopelita Sembiring, S.H	Nopelita Sembiring, S.H	KPN Pangaraian	Pasir	Ketidak puasan Hakim Anggota Nopelita Sembiring, SH selaku Anggota Majelis	<p>1. Membentuk Tim Pemeriksa dengan Nomor : W4.U/6208/PS.05/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 Tim pemeriksa : a. Didiek Riyono Putro, S.H., M.H a. Abdul Hutapea, S.H., M.H a. Dr. H. Priyatno Iman Santosa, S.H., M.H</p> <p>2. Masih dalam proses klarifikasi terhadap pelapor.</p>

4. EVALUASI

Pada tahun 2022 dilakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang di Pengadilan Tinggi Riau maupun 15 (lima belas) satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan briefing setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri di bawahnya.
2. Membuat kontrak kinerja. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa satker tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan /kontrak kinerja pada tahun sebelumnya. Terhadap satker yang belum melakukan tindaklanjut sesuai dengan kesepakatan kontrak kinerja akan diberikan sanksi dan dipantau secara intensif

3. Pada tahun 2022, evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan melalui :
 - a. Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik untuk melihat respon terhadap pelayanan publik. Hasil survei kepuasan pelanggan sejumlah 42 responden terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup layanan Pengadilan Tinggi Riau dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90.34 dengan mutu pelayanan SANGAT BAIK.
 - b. Survey Presepsi Anti Korupsi secara elektronik untuk melihat hasil survei masyarakat terhadap Presepsi Korupsi di Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2022, hasil Indeks Presepsi Korupsi terhadap 240 responden sebesar 3.95 dengan mutu presepsi BERSIH DARI KORUPSI.



BAB VII PENUTUP

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2022 ditengah masa pandemic covid-19, Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri dibawahnya tetap berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan memberikan pelayanan publik dengan baik dan mematuhi protocol Kesehatan covid-19 . Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Pelaksaaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Riau terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik..
4. Seluruh pengadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau sudah menerapkan Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
5. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau sudah menerapkan aplikasi E-Court dengan fitur *e-filing* (pendaftaran perkara

secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), sehingga pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan.

6. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau saat ini berusaha untuk mengimplementasikan Aplikasi e-BERPADU untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2022 pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau masih mengalami kendala antara lain :

1. Sumber daya manusia, khususnya staf yang ahli dibidang teknologi informasi masih kurang.
2. Sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang.
3. Gedung kantor yang tidak layak seperti Pengadilan Negeri Tembilahan, dan beberapa Pengadilan negeri belum punya gedung kantor sendiri seperti Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura
4. Fasilitas rumah dinas Hakim kurang, dan banyak rumah dinas yang tidak terpelihara karena tidak tersedia anggaran rehab rumah dinas.
5. Penggunaan aplikasi e-BERPADU masih belum maksimal dikarenakan masih dalam tahap transisi dari manual ke
6. digital dan masih terdapat pengembangan pada aplikasi tersebut.

B. SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau maka diperlukan :

- a. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
- b. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas

